

**GABUNGAN
LAPORAN KINERJA WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
PADA MASA PERSIDANGAN I, II, III, IV, DAN V
TAHUN SIDANG 2017-2018**

Pertemuan dengan Delegasi/Tamu Luar Negeri.

I. Masa Persidangan I

1. Tanggal 25 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Mr. Allaster Cox (Ferst Asistent Secretary For South Eas Asia Maritime Division Kedutaan Australia). Pertemuan tersebut merupakan upaya menjalankan diplomasi parlemen dengan membahas beberapa topik diantaranya politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama kedua negara.



2. Tanggal 10 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Korea Taiyoung Cho



3. Tanggal 11 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Georgia, dalam rangka Pamitan Purna Tugas di Indonesia



4. Tanggal 6 November 2017, Menerima Duta Besar Polandia Mr. Igor Kaczmarczyk



II. Masa Persidangan II

1. Tanggal 30 November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Ukraina Mr. Volodymyr Pakhil. Pertemuan bersifat tertutup.



2. Tanggal 5 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Dubes Qatar H.E. Ahmad bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamer.



3. Tanggal 5 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Dubes Turki H.E. Mehmet Kadri Sander Gurbus.



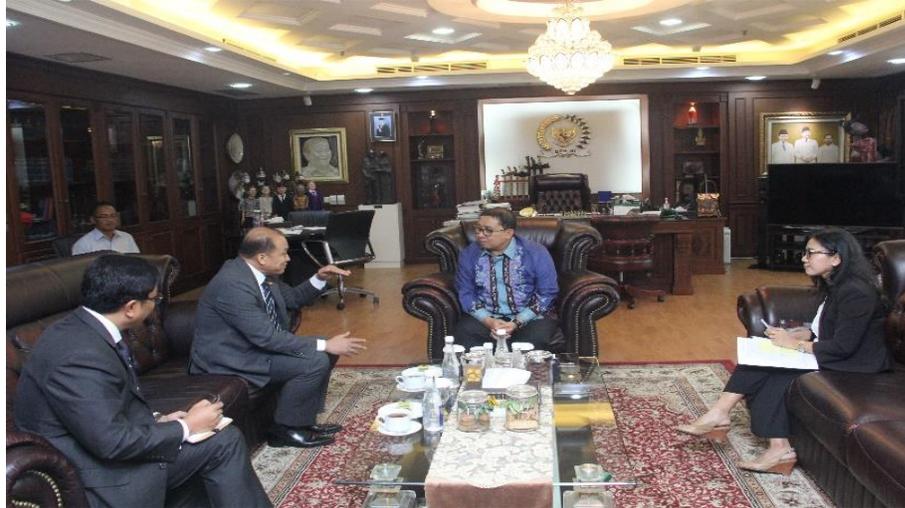
4. Tanggal 6 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Korea Selatan H.E. Mr. Taiyoung Cho.



5. Tanggal 6 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Libya H.E. Mr.Sadegh Mohammad Bensadegh



6. Tanggal 13 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Kamboja H.E. Mr. Hor Nam Bora.



7. Tanggal 13 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Delegasi Parlemen Korea dan Anggota Asia-Pacific Parliamentarians Conference and Development (APCEED). Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Parlemen Korea menyampaikan beberapa hal, yaitu:
- Anggota Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan. Tahun 2016 Indonesia berhalangan hadir di APPCED dikarenakan agenda DPR RI sangat padat.
 - Parlemen Korea sudah menjadi tuan rumah dan menjadi Sekretariat Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) selama 20 tahun serta menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ditahun berikutnya.
 - Korea Selatan belajar sistem pemilu di Indonesia yang sudah berjalan baik.



Menanggapi pernyataan Delegasi Parlemen Korea, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Asia Pacific Parleментарians Conference on Environment and Development (APPCED) dan meminta dukungan untuk menjadi pemimpin dalam acara Asia Pacific Parleментарians Conference on Environment and Development (APPCED).
 - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan dilakukan sistem pemilihan umum secara transparan pada tahun 2019 yang proporsional dan terbuka, sehingga mengurangi konflik dalam internal partai.
 - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pernah belajar pada tahun 1994 di Saemaul Undong dalam bidang pertanian karena melihat baiknya sistem pertanian disana yang menerapkan 3 spirit diligence, self reliance dan cooperation oleh Presiden Korea Selatan.
 - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta data ter update terakhir yang telah diselenggarakan pada Asia Pacific Parleментарians Conference and Development (APPCED) pada tahun 2016 dan masih belajar soal sistem pemilihan umum kepada negara-negara lain termasuk Korea Selatan.
8. Tanggal 22 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Bangladesh, H.E.Mr. Major General Asmal Kabir, OSP., pse dan Indonesia Humanitarian Alliance

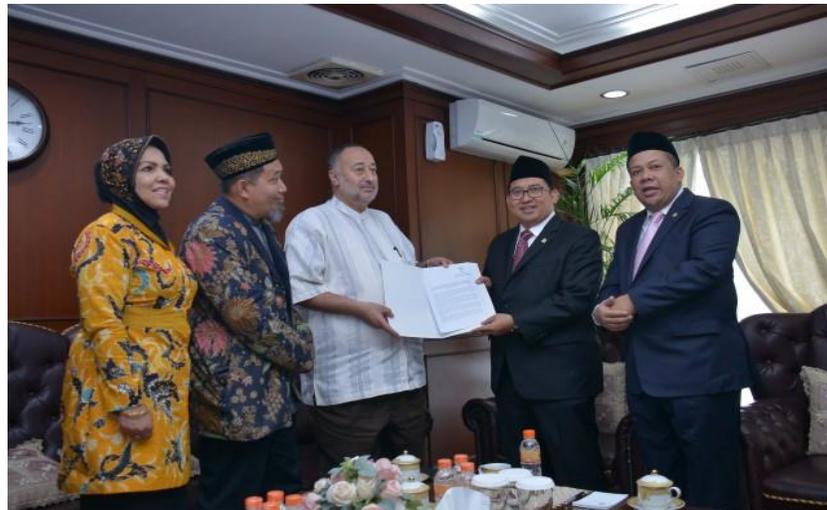


III. Masa Persidangan III

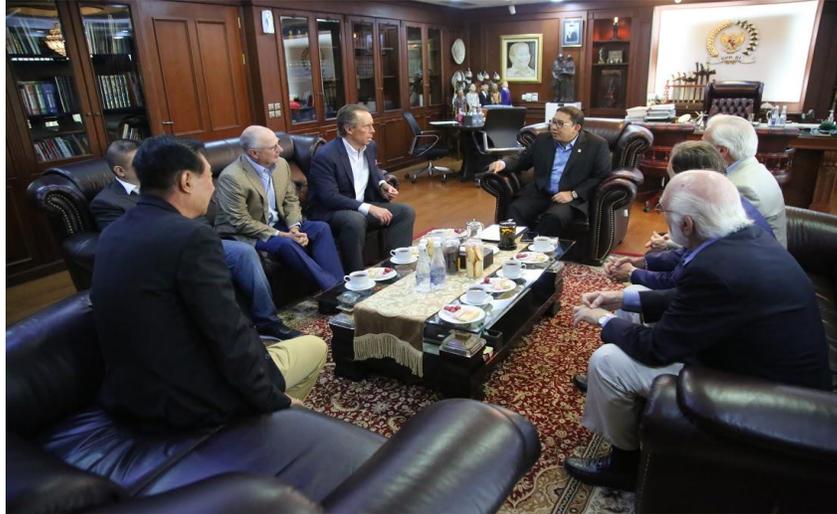
1. Selasa, 9 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Palestina (Ismail Haniye) didampingi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dan Ketua BKSAP Nur Hayati Asegaf. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Palestina menyampaikan:
 - Surat ucapan terima kasih dari Rakyat Palestina yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
 - Rakyat Palestina berkomitmen menjaga persatuan antara Hamas dan Fatah demi menjaga Palestina serta mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang membela bangsa Palestina soal Yerusalem dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Berjanji bahwa DPR akan memperjuangkan bangsa Palestina dalam forum Internasional.
- DPR RI bersama Pemerintah RI punya sikap yang tegas untuk perjuangan Palestina dan Yerusalem Timur khususnya adalah ibu kota Palestina dan kita mengancam pernyataan sepihak Presiden Donald Trump.



2. Selasa, 23 Januari 2018, menerima tamu dari USA (The Nasional Prayer Breakfast, Washington DC., yaitu: 1. Mr. StanHolmes, 2. Mr. Bill wall, 3. Mr.Kenneth Hall, 4. Mr. Keith Court, 5. Mr. Roy Thompson, dan Mr. Palm.



3. Rabu, 31 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Qatar (YM. Ahmad Bin Jasim Mohammed Ali Al Hamar) di kediaman Dubes Qatar.



4. Rabu, 14 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Duta Besar Uzbekistan (H.E. Mr. Shavkat Jamolov).



5. Senin, 26 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Courtesy Call Delegasi Parlemen Lybia H.E. Mrs. Halima Sadeq.





IV. Masa Persidangan IV

1. Senin, 5 Maret 2018 Pertemuan dengan duta Besar Kazakhstan , H.E. Mr. Askh T.Orazbay

Dalam pertemuan tersebut Duta Besar Kazakhstan menyampaikan :

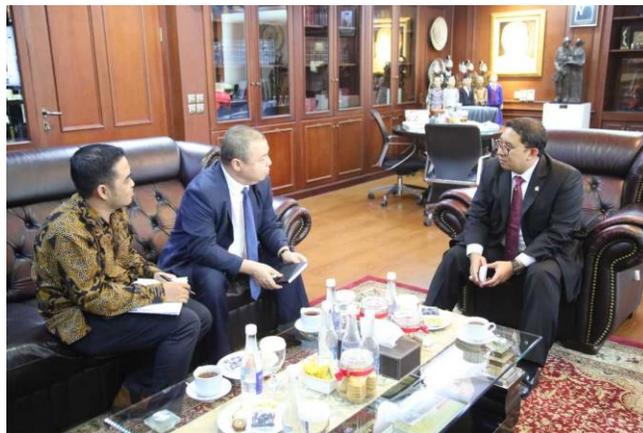
- Rencana kedatangan Ketua beserta Anggota Delegasi Parlemen Kazakhstan pada tanggal 11-14 Maret 2018.
- Meminta untuk diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta.
- Ingin mengadakan kunjungan Wisata ke Taman Mini Indonesia Indah beserta makan malam bersama.



Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

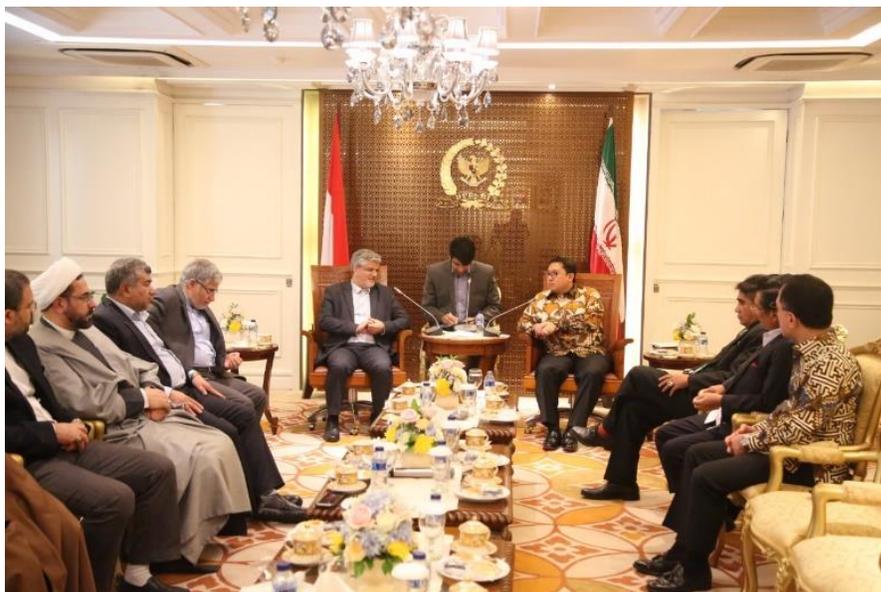
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pertama kalinya kedatangan Ketua Parlemen Kazakhstan dan kedatangan pada pertengahan Maret ini diperuntukan untuk mempererat hubungan Bilateral antar negara dalam membangun perekonomian yang lebih baik terutama di bidang perdagangan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan menerima Ketua beserta Anggota Delegasi Parlemen Kazakhstan di Bandara Soekarno-Hatta serta juga menyambut dalam acara makan malam bersama Ketua beserta Anggota Delegasi Parlemen Kazakhstan.

2. Senin, 5 Maret 2018, Pertemuan dengan Dut Besar Aljazair, (H.E. Mr. Abdelkader Aziria



3. Dalam pertemuan tersebut Duta Besar Kazakhstan menyampaikan :

- Pembahasan tentang isu kemanusiaan yang sedang marak terjadi di negara Islam. Serta sering saling bantu Indonesia-Iran dalam forum-forum internasional.



- Ingin terus bekerja sama dalam hubungan bilateral antara kedua negara serta dalam pariwisata Negara Iran mengajak Indonesia bekerja sama untuk memajukan destinasi wisata yang berkunjung setelah *Umrah* agar juga mengunjungi Negara Iran.
- Pembicaraan soal kebijakan isu nuklir di Negara Iran.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa kontribusi Negara Iran sangat tinggi serta sangat diapresiasi dalam membantu misi perdamaian apalagi untuk Negara Palestina dan Pengungsi Rohingya.
 - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam hubungan Indonesia dengan Iran di berbagai forum internasional sangat baik dan dalam bidang wisata Iran mempunyai beberapa situs sejarah yang sangat menarik dan harusnya bisa dikunjungi seperti makam Imam Gazali merupakan salah satu imam yang penting bagi masyarakat Indonesia.
 - Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan soal isu nuklir yang berada di negara Iran yang sempat jadi polemik bahkan dunia internasional sempat memberikan embargo ekonomi.
4. Selasa, 13 Maret 2018, menyambut Kedatangan Kunjungan Delegasi Parlemen Kazakhstan ke Parlemen Indonesia di Bandara Sukarno Hatta.



5. Selasa, 13 Maret 2018, menghadiri Jamuan makan malam Delegasi Parlemen Kazakhstan di Fairmont Hotel.



6. Senin, 19 Maret 2018, menerima Courtesy Call Duta Besar Portugal Mr. Rui Fernando Sucena do Carmo.



V. Masa Persidangan V

Pertemuan Delegasi Masyarakat/Konstituen atau Kegiatan Lainnya

I. Masa Persidangan I

1. **Selasa, 29 Agustus 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Ikatan Keluarga Minang (IKM).** Pertemuan tersebut membicarakan pembentukan Formatur, rencana pelantikan, dan menyusun program kerja IKM ke depan.



2. **Selasa, 29 Agustus 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Komunitas Rumah Makan Kasihan Ombak Ikon Kuliner Senayan.** Dalam pertemuan tersebut delegasi menyampaikan pengaduan atas pengusuran lokasi kuliner di lahan Gelora Bung Karno, termasuk RM Kasihan Ombak pada tanggal 26 Agustus 2017 dengan



alasan Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Terhadap pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada beberapa pihak terkait agar dicarikan solusinya sekaligus mencari dimana rencana tempat pengganti area kuliner tersebut.

3. **Selasa, 5 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Masyarakat Adat Lau Cih.** Dalam pertemuan tersebut delegasi menyampaikan beberapa hal, antara lain:

- Sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 (sekarang ini) HGU PTPN II diterlantarkan seluas 854 Ha dan telah ditempati oleh 3 desa dengan jumlah masyarakat sekitar 2.000 KK.
- Dengan memakai HGU dipergunakan untuk menggusur paksa masyarakat, dan berikutnya HGU tersebut dipergunakan untuk pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan oleh Perum Perumnas.
- Adanya penyalahgunaan peruntukan kalau dilihat dari Regulasi UU. No. 39 Tahun 2014, dimana HGU seharusnya dipergunakan untuk perkebunan dan bukan untuk perumahan.
- Menuntut agar HGUnya dibatalkan karena di PP 40 tahun 1966 dijelaskan, kalau ditelantarkan diatas tanah tidak boleh ada HGU dan itu bisa dibatalkan oleh pejabat Prona.
- Mengharapkan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam (Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc) meneruskan kepada Kementerian BUMN agar bisa mengambil kebijakan terhadap kasus tersebut.

Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada delegasi supaya segera mengirimkan surat dan kronologis kasus tersebut untuk diteruskan ke PTPN II atau kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).



4. **Selasa, 5 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).**

Dalam pertemuan tersebut, KPPI menyampaikan beberapa hal antara lain:

- KPPI adalah organisasi perempuan lintas parpol, terdiri dari 11 (sebelas) parpol ada semua di KPPI. KPPI ingin memperkenalkan jajaran kepengurusan KPPI Periode 2016-2021. KPPI didirikan sejak tahun 2000. KPPI menyampaikan kinerja KPPI sejak dilantik sampai bulan Agustus 2017, sudah banyak kegiatan yang dilakukan baik yang sifatnya mandiri, kerjasama, baik dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, baik sebagai narasumber maupun penyusunan konsep-konsep serta membangun hubungan dengan media. Tanggal 8 September 2017 akan diadakan acara hari lahir KPPI yang ke 17, sekaligus ingin mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Memohon Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam membantu mensinergikan program di KPPI dengan program di DPR RI.
- Menyampaikan masukan terkait kesetaraan gender sekaligus meminta dukungan DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk mendorong afirmasi perempuan di politik, terutama dorongan untuk 30 persen perempuan dalam partai politik yang tidak hanya sekedar berada dalam struktur, melainkan juga menjadi pengurus harian.
- KPPI mendapat teguran dari PBB dalam kongres perempuan dunia yang digelar PBB beberapa waktu silam karena jumlah perempuan yang masuk dalam politik hanya 11 persen, walaupun saat ini sudah mencapai 17 persen, namun masih jauh dari jumlah 30 persen yang diamanatkan oleh undang-undang.
- Memohon agar RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang pernah masuk di prolegnas bisa masuk di RUU prioritas dan mengharapkan RUU yang terkait dengan kepentingan perempuan dan anak terkait gender sensitifitas diakomodir dalam setiap UU dan kebijakan.

Menanggapi isu yang disampaikan KPPI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa tugas KPPI adalah bagaimana meningkatkan *capacity building* dari perempuan-



perempuan Indonesia di bidang Politik. Selanjutnya, terkait kerjasama KPPI dengan DPR RI mungkin bisa dilakukan *workshop*, pelatihan dan seminar.

5. **Rabu, 11 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Masyarakat dari Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggusur Kampung Bayam untuk kepentingan pembangunan stadion BMW dan meminta untuk datang ke lokasi dan berdialog dengan Warga Kampung Bayam.**

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal yaitu :

- Akan meneruskan aspirasi ini dengan mengirimkan surat kepada Pemprov DKI terkait persoalan penggusuran di kampung Bayam.
- Berencana mendatangi Kampung Bayam, Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Rabu, 13 September 2017 didampingi Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dan Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo.



6. **Rabu, 13 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Gerakan Bersama Pekerja dan Buruh Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN).**

Dalam pertemuan tersebut, GEBER BUMN menyampaikan beberapa hal, yaitu:

- Gerakan Buruh Pekerja BUMN (GEBER BUMN) tersebar di seluruh nusantara, yang saat ini mengadakan audiensi diwakili oleh Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta.
- Hasil dari RDPU antara Komisi IX yang diketuai oleh Bapak Dede Yusuf dengan GEBER BUMN tanggal 4 Desember 2014 lalu telah memutuskan untuk diadakannya Rapat Kerja Gabungan (RAKERGAB) antara Komisi VI dan IX DPR RI guna menyelesaikan persoalan *Outsourcing* di BUMN. Untuk mendorong adanya RAKERGAB, GEBER BUMN sudah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI yang pada intinya menyikapi persoalan buruh BUMN serta menyetujui untuk diadakannya Rapat Kerja Gabungan untuk membahas *Outsourcing*;

- Komisi IX DPR RI Periode 2009-2014 telah membentuk Panja *Outsourcing* BUMN dan mengeluarkan rekomendasinya sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun rekomendasi Panja *Outsourcing* belum terwujud hingga saat ini;
- GEBER BUMN mendesak untuk segera dilaksanakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, dan BUMN-BUMN, agar kondisi normatif atas hak pekerja tetap terjaga khususnya penyelesaian persoalan Outsourcing di BUMN yang telah menyimpang dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012.
- Memohon kepada Wakil Ketua DPR RI Korpolkam untuk dapat menyelesaikan masalah out sourcing khususnya di PT. Krakatau Steel. Pengadu sudah puluhan tahun kerja di PT. Krakatau Steel dan terjebak dengan usia pensiun karena usia menentukan untuk diangkatnya menjadi karyawan tetap. Saat ini PT. Krakatau Steel merekrut 270 dan pengadu mempertanyakan kenapa bukan dari tenaga outsourcing yang sudah ada. Meminta Direksi PT.Krakatau Steel untuk duduk bersama. Memohon Wakil Ketua DPR RI memanggil Dirut PT. Krakatau Steel, karena jomplang kesejahteraannya antara buruh Krakatau steel dengan karyawan tetap.

Menanggapi pengaduan dari GEBER BUMN, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Sangat memahami dan mendukung apa yang diperjuangkan buruh terkait out sourcing. Apa yang menjadi keputusan Panja pada DPR RI periode lalu memang DPR tidak ada istilah carry over, sehingga apa yang diputuskan periode lalu maka berhenti di periode lalu, tetapi itu bisa menjadi bahan rujukan pada Komisi terkait.
- Mengenai Raker Gabungan, berdasarkan surat pengaduan ini, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan meneruskan kepada Komisi VI dan Komisi IX juga kepada Bapak Dr. Agus Hermanto (Koordinator Komisi VI) dan Bapak Fahri Hamzah (Koordinator Komisi IX).



- Untuk masalah kasuistis seperti Outsourcing PT.Krakatau Steel dan BUMN-BUMN lain agar membuat surat ke DPR RI (Ke Pimpinan DPR RI atau Komisi VI DPR RI) yang nantinya akan dijadikan bahan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah.

7. **Senin, 25 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Komunitas Transportasi Indonesia.**

Dalam pertemuan tersebut, Komunitas Transportasi Indonesia menyampaikan beberapa hal:

- Ide integrasi transportasi publik lewat aplikasi telepon genggam.
- Integrasi transportasi publik lewat aplikasi bisa memberikan pilihan kepada masyarakat akan transportasi umum dengan tarif yang terjangkau dan akuntabel, serta dari sisi keamanan juga lebih bagus karena bisa terdeteksi dimana orang itu berada.
- Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah pengguna transportasi publik baru mencapai 12-15 persen dari total pergerakan transportasi di Jakarta.
- Ada dua alasan yang menyebabkan minimnya angka penggunaan transportasi publik. Pertama ketersediaan angkutan massal yang baik dan kedua konektivitas angkutan massal di Ibukota.
- Tanggal 10 Oktober 2017 akan diadakan launching bersama Gubernur DKI terpilih. Tanggal 28 Oktober 2017 nanti akan dilakukan uji coba transportasi publik menuju era tanpa uang tunai, dan memohon kesediaan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk sebagai salah satu peminanya.

Menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Komunitas Transportasi Indonesia, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Menyambut baik ide integrasi transportasi publik lewat aplikasi, karena memang



selama ini belum ada aplikasi yang menyangkut kendaraan umum dan gagasan ini

merupakan gagasan yang bagus perlu diperdalam dan dikaji dan bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah usulan kerjasama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

- Menyarankan agar Komunitas Transportasi Indonesia bertemu langsung dengan gubernur DKI dan wakil gubernur DKI terpilih yaitu Anis-Sandi untuk pemaparan usulan aplikasi ini, dan ini tugas Pemerintah DKI Jakarta yang akan datang yang pernah menjanjikan pada saat kampanye Pilkadanya.

8. **Senin, 25 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Forum Umat Islam (FUI).**

Dalam pertemuan tersebut, FUI menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Kedatangannya ke DPR RI adalah dalam rangka untuk bagaimana tindak lanjut ke depan yaitu menekankan tentang TAP MPRS Nomor : 25 Tahun 1966, karena Tap ini masih berlaku dan berjalan karena adanya penyebaran ideologi terlarang sudah terang-terangan, terakhir terjadi di LBH.
- LBH Jakarta khususnya sudah sering kali mengadakan sebagai tempat untuk dijadikan sponsor kebangkitan kembali ideologi-ideologi terlarang dan terus berulang di LBH ini, pada akhirnya menimbulkan korban di kalangan masyarakat.
- FUI meminta kepada DPR RI dan semua Anggota DPR RI untuk mengawal konstitusi tentang larangan PKI dengan betul-betul dan meminta kepada MKD agar memberhentikan anggota yang memang sudah terang-terangan anti Pancasila. Untuk itu pada hari ini FUI minta supaya ke depan betul-betul Pancasila menjadi Ideologi Negara.
- FUI minta kepada DPR untuk senantiasa betul-betul mengawal TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, dan ketentuan ini masih ada dan belum dicabut, tunjukkan bahwa negara kita berdaulat dan tidak diintervensi.
- Dalam masalah ini memang banyak sekali terjadi kejanggalan dan keanehan. Di Gedung LBH setingkat Kapolda tidak diijinkan dan ditolak masuk oleh panitia yang ada di gedung LBH. Inilah yang akhirnya membuat massa betul-betul ingin mengecek ada apa yang ada didalam. Massa yang menentang PKI justru dibubarkan disemprot water canon sedangkan yang rapat di gedung LBH membicarakan PKI tidak dibubarkan.

Adapun Kronologi Peristiwa LBH Jakarta antara lain :

- a. Hari Sabtu, 16 September 2017, sudah tersebar di media sosial undangan untuk aksi unjuk rasa di LBH Jakarta yang dipimpin oleh **Rahmat Himran seorang aktivis**. Undangan tersebut menuntut untuk tolak dan bubarkan seminar pembela PKI di LBH Jakarta, tangkap, dan proses hukum otak dari penyebaran paham Komunis di Indonesia.
- b. Hari Minggu 17 September 2017 kurang lebih sekitar pukul 12.30 ada terdapat beberapa orang memasuki LBH Jakarta, kemudian menyanyikan lagu genjer-genjer, akhirnya beberapa elemen hadir kesana untuk meminta polisi untuk

membubarkan acara tersebut dan meminta menangkap orang yang ada didalam karena telah menyebarkan paham komunis.

- c. Hari Senin, 18 September 2017, pukul 00.15 WIB setelah pihak kepolisian sudah menyiagakan Team Penembak Gas Air Mata dan Water Cannon untuk bersiap-siap membubarkan massa yang ada di sekitar LBH Jakarta. Dan Kapolres menerangkan kembali bahwa tidak ada kegiatan di dalam Gedung LBH Jakarta. Massa mulai mundur ke arah Jl. Cikini Raya diminta oleh Tokoh Masyarakat yang ada di Lokasi, akhirnya pada pukul 01.30 WIB terjadi Cheos antara masyarakat dan pihak Kepolisian yang ingin membubarkan masyarakat. Masyarakat tidak terima karena orang-orang yang di dalam LBH Jakarta tidak dibubarkan dan ditangkap karena telah membuat keresahan masyarakat, bahkan masyarakat yang anti PKI dibubarkan, disemprot air water cannon, ditembak gas air mata dan ditembakkan peluru karet, massa mundur terus sampai ada yang di kejar ke Jl. Kramat Raya. Pada peristiwa itu memakan Korban luka-luka dll.
- Dilaporkan bahwa pada tanggal 29 September 2017 dari alumni peristiwa 212 dan beberapa Ormas juga akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Adapun agenda yang dibawa adalah 1. Tolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dan 2. Tolak dan lawan kebangkitan PKI. Dan tuntutan nya adalah bagaimana agar supaya DPR memanggil Kapolri untuk mempertanggungjawabkan kejadian di LBH. Masa yang hadir tidak kurang dari 50.000 orang pada hari Jumat/badda solat Jumat.
- Memohon dengan hormat kepada Bapak Fadli untuk mengkondisikan didalam, supaya Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR juga supaya bisa menerima Jumat besok, pada tanggal 29 September 2017 besok.

Menanggapi aspirasi dari FUI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Ucapan terima kasih kepada tokoh-tokoh Ormas, para Ulama, para Ustad yang bergabung didalam FUI, dan terima kasih atas penyampaian aspirasi dan kedatangannya terkait apa yang telah disampaikan tadi khususnya keprihatinan soal masalah Komunis.
- Menyampaikan bahwa ketika peristiwa itu terjadi tidak berada di dalam negeri dan terjadi semacam komplik, bentrok pada malam hari itu namun sejauh ini Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam tidak pernah mendapatkan satu duduk soal yang jelas sebenarnya apa yang terjadi siapa yang mulai, apakah betul atau tidak didalam itu ada satu kegiatan melanggar undang-undang sehingga perlu mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak terkait kejadian ini.
- Karena didalam kronologisnya tertulis dipimpin oleh Sdr. Rahmat Himran, maka perlu juga digali keterangan yang bersangkutan, karena ini adalah satu peristiwa yang terjadi pada malam itu tetapi kita tidak ingin berulang.
- Terkait TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, karena Tap ini sudah jelas dan tidak bisa diubah, memang untuk melakukan perubahan itu memerlukan suatu proses politik yang

tidak mudah, dan itu sudah menjadi norma hukum yang jelas didalam tata urutan perundang-undang kita.

- Tentang rencana aksi tanggal 29 September 2017 nanti Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan menyampaikan kepada kawan-kawan yang terkait aspirasinya tentang apa nanti kita terima delegasinya.



9. **Senin, 25 September 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Korban Penyerobotan Tanah Kavling Depdikbud di Pesanggrahan, Bintaro, Kabupaten Lama.**

Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan kronologi permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Pada tahun 1965 Guru/Karyawan Departemen P dan K sebanyak \pm 300 orang melalui Koperasi membeli tanah milik Moch. Bin Damin Cs. Di Desa Bintaro, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. Masing-masing guru/karyawan mendapat 500 M2.
- Pembelian tersebut dituangkan di dalam Akte Jual Beli yang ditandatangani oleh penjual dan Pembeli dan Camat Ciputat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah serta Lurah Bintaro (Moch. Yasin) sebagai saksi.
- Selanjutnya masing-masing pemilik tanah mengurus sertifikatnya ke Tangerang. Sampai tahun 1977 sebagian besar akte tersebut sudah menjadi Sertifikat hak milik.
- Pada tahun 1974 Desa Bintaro tersebut dimasukkan dalam Wilayah DKI sebagian tetap menjadi Wilayah Bintaro, sebagian menjadi Wilayah Desa Pesanggrahan.

Menanggapi aspirasi dari delegasi, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Meminta kepada warga yang tanahnya diserobot menyurati Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, kemudian juga dilampirkan kronologi, bukti-bukti seperti sertifikat yang terkait dalam 1 (satu) bendel, agar bisa dipelajari apa yang bisa dilakukan dengan pihak terkait.
- Akan dikomunikasikan dengan Komisi II, mengingat waktunya sudah cukup lama.



10. **Senin, 2 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Indonesia Parliamentary Centre (IPC).**

Dalam pertemuan tersebut, IPC menyampaikan beberapa hal, yaitu:

- IPC meminta dukungan untuk bisa mengakses kesistem yang berkaitan dengan PPID. Dalam struktur PPID yang mencakup Parlemen Modern itu sendiri menerapkan seperti mengelola serta melayani informasi, tetapi di sisi lain PPID masih kurang menerapkan informasi yang lengkap karena adanya penghambat di sisi terkait.
- IPC ingin membantu merevisi dimana Undang-undang No.1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Informasi yang pada saat itu sudah ada revisi terlebih dahulu Tahun 2008, masih banyaknya data yang perlu diperbaharui dan pengecualian informasi. Point penting selanjutnya yang harus diperhatikan ialah membenaran informasi yang meliputi juga sarana informasi.
- Meminta dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk buka suara tentang Open parlement di Indonesia. IPC melanjutkan terusan dimana DPR RI harus merapihkan dalam segi aspek seperti Naskah Akademik, Sikap-sikap Pemerintah dan Prinsip-prinsip Anggota Komisi/Fraksi.

- IPC menghimbau untuk setiap arsip segera didigitalkan untuk mengurangi resiko kehilangan karena dalam kebutuhan kunjungan dalam museum DPR RI atau permintaan Arsip itu sendiri terkadang dibagian Arsip tidak bisa menemukan karna masih banyaknya Arsip yang tertinggal/belum dilaporkan kepada bagian Arsip.
- Belumnya terealisasi terhadap penunjang kelengkapan alat Rapat/Sidang seperti hapsap agar bisa terealisasi saat adanya perdebatan.

Menanggapi aspirasi dari IPC, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Dalam beberapa tahun belakang ini sedang memperbaiki paradigma Parlemen Modern. Adanya kemajuan terbuka dalam akses di ruang lingkup media publik bagian pelayanan informasi maupun arsip dalam UUD MD3 yang baru.
- Hanya di Indonesia yang segala informasinya bisa terbuka secara umum dilihat dari negara-negara besar lain seperti Amerika & Inggris. Dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyimpulkan untuk bersama-sama membangun kinerja yang baik serta penataan dari segi informasi itu yang dibutuhkan kepada seluruh Lembaga.
- Sudah ada pembicaraan tentang pengadaan perpustakaan khusus untuk memasukan risalah-risalah yang lama atau terbengkalai di bagian arsip untuk dipindah ke perpustakaan khusus karena itu sendiri akan menjadi sumber informasi yang sangat penting. Meminimalisir arsip yang hilang maka harusnya dibuat 2 (dua) rangkap seperti berbentuk paper dan digital karena informasi tersebut yang terlampir akan berfungsi untuk kita semua.
- Rapat/sidang di beberapa parlemen Negara lain sangat tertutup untuk kebijakan suatu negara. Beberapa kali pernah adanya rapat gabungan dengan Komisi I & Komisi III dimana banyak media yang menghadiri rapat tersebut, ketika diminta untuk meninggalkan ruangan rapat karena adanya rapat tertutup maka mereka menghormatinya. Jadi untuk pengecualian informasi yang dirahasiakan untuk hal umum akan dihormati oleh para media ataupun masyarakat umumnya.
- Akan dibahas dalam Rapim bersama Sekjen untuk pengadaan hapsap yang akan berfungsi dalam acara rapat. Karena ada beberapa faktor kendala yang sampai saat ini belum terlaksanakan pengadaan tersebut.



11. Rabu, 5 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Gerakan Pemuda Al Washliyah

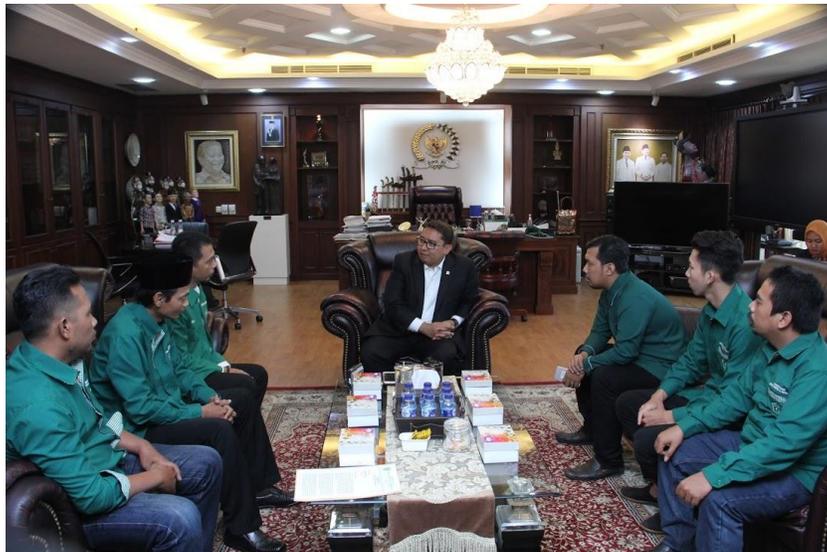
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah menyampaikan pernyataan sikapnya yaitu:

- Bahwa akhir-akhir ini kita dicemaskan kembali dengan munculnya issue kebangkitan komunis di Indonesia, hal tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Komunis adalah Bahaya Laten yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara juga merusak idiologi bangsa ini. Oleh karena itu kami Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP. GPA) meminta kepada DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon agar tetap mempertahankan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, tentang larangan penyebaran Partai Komunis Indonesia.
- Ulama adalah suri tauladan, tempat bertanya, serta Imam bagi Ummat Islam. Serta keberadaannya sangat strategis bagi kebaikan juga perbaikan juga perbaikan karakter generasi Bangsa ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merdeka dari pada penjajah karena andil besar pada Ulama yang ada pada saat itu, apa lagi Islam adalah Agama terbesar di Indonesia. Untuk itu kami meminta kepada DPR RI agar tetap menyuarakan untuk tidak mengkriminalisasi pada Ulama bahkan harus menghormati dan mencintai pada Ulama di Indonesia.
- Membangun bangsa adalah tugas setiap Anak Bangsa ini, sebab tidak mungkin membangun bangsa yang besar ini hanya diserahkan kepada pemerintah sendiri. Peran Ormas-ormas Islam sangat penting untuk tetap ikut aktif membangun karakter dan Sumber Daya Manusia sehingga dapat tercipta insan-insan yang memiliki daya saing sehingga bermanfaat bagi Indonesia. Untuk itu meminta kepada DPR RI agar tetap memperhatikan serta memberi support kepada Ormas-ormas Islam umumnya dan Organisasi Kepemudaan Islam Khususnya.
- Barang-barang Import banyak beredar di Indonesia yang masuk dari Negara luar, padahal kalau diperhatikan produk tersebut dibuat di Indonesia, secara ekonomi hal ini dapat merugikan, untuk itu meminta kepada DPR RI agar membuat regulasi yang lebih ketat terkait barang-barang import sehingga produk-produk yang masuk ke Indonesia memang tidak diproduksi di Indonesia dan regulasi tersebut tetap harus berpihak kepada pengusaha Indonesia.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Gerakan Pemuda Al Washliyah, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Mengucapkan selamat kepada saudara menjadi yang terpilih menjadi Ketua Umum dari Gerakan Pemuda Al Washliyah.

- Bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu sudah final karena MPR sudah tidak ada lagi dan ditutup pada waktu TAP MPR yang terakhir maka seluruh TAP MPR yang ada itu dinyatakan berlaku. Oleh karena itu untuk mengubah untuk mencabut itu sangatlah sulit. Dan itulah yang paling tepat untuk melihat ancaman komunisme di Indonesia.
- Sependapat bahwa kriminalisasi ulama ini tidak boleh terjadi ketika suasana pilkada di DKI dapat dilihat bahwa ada kecenderungan terhadap kriminalisasi ulama artinya kasus-kasus yang masih sangat sumir diterapkan kepada Ulama dan ini menjadi reaksi balik.
- Menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil tidak melakukan diskriminasi terhadap terutama kepada para Ulama.yang jelas-jelas tidak mempunyai pelanggaran terhadap hukum.
- Mengenai import khususnya import pangan kita juga sebenarnya menentang karena import ini telah membuat kita jauh dari cita-cita untuk kedaulatan rakyat.
- Mengenai undangan Milad, tanggal 13 Febreuari 2018, akan diagendakan kalau tidak ada agenda Sidang Parlemen di Luar Negeri.



12. Kamis, 5 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan:

- Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa, menyampaikan terkait dengan bagaimana lahirnya Perppu, cacat dari awal tidak melihat kepentingan memaksa dan beberapa isinya sangat kawatir terhadap kontribusi negeri ini.

- Kedatangan Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa ini ke DPR adalah dalam rangka “**Menolak dengan Tegas Perppu Nomor 2 Tahun 2017**” dan meminta DPR RI membatalkan Perppu ini.
- Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa mengharapkan agar Perppu ini jangan sampai meningkat menjadi Undang-undang hal ini sangat berbahaya.
- Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa meminta kepada Bapak Faddli Zon yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk bisa membatalkan dan menolak Perppu ini untuk mewakili aspirasi Organisasi Masyarakat khususnya Organisasi Masyarakat Islam.

Menanggapi aspirasi dari Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, kebetulan mempunyai sikap yang sama untuk menolak Perppu ini.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan persoalannya adalah ketika berbicara pengambilan keputusan di Rapat Paripurna itu sangat tergantung kepada sikap Partai-partai dalam hal ini adalah Fraksi-fraksi, kalau dilihat petanya sejauh ini fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah itu masih berada didalam posisi yang lebih besar, inilah yang jadi masalah. Namun, setidaknya dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, F.PAN dan F.PKS kecenderungannya untuk menolak Perppu ini.
- Akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolak Perppu ini karena bagian dari Fraksi Gerindra akan mencoba untuk sejalan, karena ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita Pasal yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul menyampaikan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya.



- Selain dari Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga sempat menerima delegasi dari Ormas-ormas Islam yang datang bahkan berdemonstrasi di depan gedung DPR RI.
13. **Kamis, 19 Oktober 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).**
- Dalam pertemuan tersebut, KSPI menyampaikan beberapa hal:
- Mengeluhkan tentang kartu BPJS jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bahwa didalam UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 28 mengenai hak rakyat dan Pasal 34 kewajiban negara untuk meningkatkan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
 - Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 5% dari anggaran APBN untuk jaminan kesehatan tetapi itu masih belum cukup untuk bisa mengcover secara keseluruhan. Rumah Sakit Umum banyak yang menolak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait biaya Dokter yang menerima upah sekitar Rp. 2.000/pasien.
 - Dalam penggunaan kartu JKN/BPJS Kesehatan di Rumah sakit umumnya juga masih terbebani oleh biaya tambahan seperti obat dan biaya inap kamar Rumah Sakit.
 - Pemerintah harus membantu dalam sistem kerja sama oleh Rumah Sakit Umum agar setiap Rumah Sakit bisa menerima pengguna kartu BPJS Kesehatan. Dalam peran ini Pemerintah harus ikut ambil sikap membantu mensosialisasikan.
 - Diluar pembicaraan tentang BPJS pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mereka meminta kejelasan terhadap status Guru Honorar menjadi PNS/Staff.



Menanggapi aspirasi dari KSPI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Bahwa banyak komplain terhadap pelayanan BPJS Kesehatan ini. Dalam anggaran APBN sebesar 5% ini harusnya untuk pembiayaan jaminan kesehatan itu sendiri gratis untuk pengguna kartu BPJS Kesehatan
- Tentang guru honorer perlu dijelaskan status kepegawaian mereka tetapi masih ditolak oleh Pemerintah.
- Meminta dibuatkan surat agar bisa diproses kepada pihak terkait. Ini bisa juga menjadi evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama 3 tahun ini.

14. Senin, 2. November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Buni Yani dan Tim Pembela/Advokat Sdr. Buni Yani.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pembela/Advokat Sdr. Buni Yani menyampaikakn hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kedatangan tim Buni Yani ini ke DPR dalam rangka melaporkan proses penegakkan hukum di negara kita, tanggal 14 November 2017 Majelis Hakim akan membacakan Putusan atas perkara Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung.
- Setelah hearing dengan Kejagung prosesnya dipaksakan, untuk dilanjutkan ke proses Pengadilan.
- Di proses Pengadilan Pak Buni Yani didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1). Jaksa menuntut Pak Buni 2 Tahun dan denda 100 Juta Rupiah. Putusan ini ada yang mengagetkan akhirnya Jaksa dari dakwaan alternatifnya memilih tuntutan 1 Pasal yaitu Pasal 32 ayat (1).
- Ada hal yang mengagetkan terkait dengan pernyataan Jaksa Agung dalam Rapat resmi dengar Pendapat dengan DPR RI, beliau mengatakan dan dikutip oleh banyak media, bahwa tuntutan 2 tahun untuk Buni Yani ini adalah sebagai bentuk keseimbangan vonis Ahok. Jadi Tim Kuasa hukum ini semakin yakin bahwa perkara Pak Buni Yani ini sarat dengan banyak kepentingan dan variable muatan politisnya terlalu kental. Jadi motif balas dendam ini nyata terlihat.
- Jadi Banyak hal yang janggal didalam penegakan hukum Buni Yani. Untuk itu kami memohon kepada Pimpinan DPR RI melalui Bapak Fadli Zon yang terhormat, dimohon untuk datang ke Persidangan Pak Buni Yani pada agenda putusan hakim tanggal 14 November 2017.
- Dari fakta persidangan terungkap bahwa kesaksian dari pejabat Pemprov DKI bahwa vidio yang di download oleh Pemprov itu tidak sama sekali ada dis claimer artinya itu sebagai bahan informasi yang menjadi milik publik siapapun berhak mendownload, mengunduh dan kemudian melihat. Jadi tidak ada masalah.

Menanggapi aspirasi dari Sdr. Buni Yani dan Tim Pembela/Advokat Sdr. Buni Yani, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Buni Yani, Pak Aldwin dan rekan-rekan para Tim Pembela/pengacara pak Buni Yani kami tentu menerima aspirasi, masukan dan pandangan tadi yang telah disampaikan.
2. Sejak awal telah mengikuti kasus ini sebelum masuk ke Pengadilan. Didalam proses-proses awal dan pernah bertemu dalam satu acara talk show dan waktu itu menyampaikan pendapat bahwa ini tidak ada case, dan itu adalah hak setiap masyarakat terhadap pejabat publik dan video itu sudah ditampilkan didalam ruang publik, untuk menyebar luaskannya.
3. Sekarang ini berada didalam satu proses menjelang akhir dari vonis, kita harus menghargai proses hukum, proses hukum yang sudah berjalan tinggal tentu saja pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan
4. Berharap mudah-mudahan Majelis hakim bisa memberikan keadilan dengan melihat dari fakta-fakta yang telah disampaikan oleh saudara-saudara di depan sidang pengadilan termasuk sejumlah kejanggalan-kejanggalan di dalam prosesnya, saya kira seharusnya hakim bisa berbuat adil.
5. Hal ini akan menjadi satu ujian bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia, karena kalau tidak dapat satu keadilan hal ini akan menjadi satu preseden yang buruk kedepan terutama terkait dengan hak-hak setiap warga negara yang sudah dijamin oleh setiap konstitusi kita.
6. Berharap mudah-mudahan Sdr. Buni Yani mendapatkan keadilan sesuai dengan harapan dan juga kepada pada pembela dalam hal ini kepada Tim advokat yang sudah berjuang selama satu tahun juga mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan.
7. berempati dan sekaligus sebagai Anggota DPR tidak boleh ada satu kriminalisasi terhadap warga negara apalagi yang bisa mereduksi hak setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi kita UUD 1945 dan kasus ini harus segera kita akhiri dengan sebuah keadilan.
8. Pada tanggal 14 November 2017 tidak bisa hadir karena ada kegiatan konferensi yang harus dihadiri.



II. Masa Persidangan II

1. **Kamis, 30 November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Warga Kemayoran (Kasus Tanah Kemayoran).** Dalam pertemuan tersebut, Warga Kemayoran menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Melaporkan bahwa surat dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang dikirim kepada Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepolisian Negara belum mendapatkan jawaban.
 - Warga Kemayoran mengharapkan dan memohon dengan sangat kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk meminta kepada Presiden agar menunjuk jajarannya membantu masyarakat dengan membuat sertifikat tanah dimaksud.
 - Keberadaan luas tanah tersebut berjumlah 5,4 hektar. Sedangkan penduduk pada tahun 1980 - 1985 sekitar 418 KK, dan sekarang sudah mencapai 600 KK. Dari tahun 2003, warga hanya memiliki bukti seperti PBB dan PN I, sedangkan bukti surat-surat tanah tidak punya.

Menanggapi pengaduan dari warga Kemayoran, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Agar Warga Kemayoran segera mengirim surat kembali kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Atas dasar surat tersebut, akan dibuatkan surat kepada Presiden dan Menteri BPN.
- Saran agar dicantumkan masalah PBB dan PN I termasuk alasan-alasannya dan sebutkan juga jumlah warga (600 KK) yang menghuni tanah tersebut.



2. **Selasa, 5 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Masyarakat Ekonomi Syariah Pengurus Wilayah DKI Jakarta.** Dalam pertemuan tersebut, disampaikan beberapa hal yaitu:

- Masyarakat Ekonomi Syariah dalam Gerakan Transaksi Non Tunai memberikan pendapat bahwa Bank Indonesia sangat bagus dalam gagasan transaksi tunai menjadi non tunai akan tetapi mengapa hanya untuk bank tertentu saja. Dalam hal ini Bank Syariah juga ingin mengambil peran untuk masyarakat yang mengadopsi prinsip atau perilaku Syariah.
- Program OKE OCE akan dijadikan langkah selanjutnya untuk menerapkan payment non tunai Bank Syariah. UMKM yang sedang berjalan ini hanya menerapkan non tunai Bank Konvensional, diharapkan dalam program ini Bank Syariah bisa berjalan dengan baik.
- Dalam aspek Pariwisata di bidang perhotelan kurangnya sertifikat halal yang berada di Indonesia. Pada tahun ini Indonesia meraih 12 penghargaan dengan destinasi wisata terbaik yang diselenggarakan di Dubai. Masyarakat Ekonomi Syariah ini mengusulkan ke bagian Pariwisata DKI Jakarta untuk memberikan sosialisai sertifikasi halal kepada setiap hotel. Salah satu hotel di Bali sudah menerapkan konsep hotel berlandaskan sikap halal.
- Masyarakat Ekonomi Syariah menyampaikan untuk membantu memFollow up GWC (Global Wakaf Corporation) agar masyarakat bisa membantu dalam kehidupan sesama.
- Pada tahun 2018 nanti Masyarakat Ekonomi Syariah ingin mengajukan Jakarta Tourism Halal Fair, sehingga Jakarta bukan hanya tempat untuk transit bermalam saja. Masyarakat Ekonomi Syariah mengusulkan Jakarta sebagai tempat makan yang berlabelkan halal seperti street food moeslem friendly.

Menanggapi masukan-masukan dari Masyarakat Ekonomi Syariah, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Hal ini adalah peluang besar dan potensi besar juga dalam dunia usaha, tapi akan menjadi dilema serta polemik bagi sebagian karyawan karena adanya pengurangan jumlah karyawan. Impact baik bagi Indonesia ialah mengurangi anggaran biaya pencetakan uang hingga triliyunan pertahunnya.
- Untuk biaya administrasi setiap pengisian ulang yang memerlukan biaya ini menimbulkan beberapa aspek pertanyaan, oleh sebab itu usulan yang sangat baik ini coba dibuatkan surat agar bisa menjadi peluang bersaing secara kompetitif untuk Bank Syariah dalam melihat kelebihan yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah tersebut.
- Akan membantu dalam menyikapi di bidang pariwisata. Ini merupakan kelemahan yang ada di industri pariwisata Indonesia karena kurangnya peluasan atau wawasan terhadap destinasi wisata dalam negeri sendiri. Masalah ini akan diteruskan kepada Komisi X dan Kementerian Pariwisata.



3. Rabu, 6 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi dengan Panitia Pameran Adiwastra Nusantara 2017.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melaporkan rencana acara pameran yang akan diselenggarakan pada bulan April 2018 nanti, anggaran pameran Adiwastra Nusantara yang akan berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC) ini terbilang sangat mahal dengan biaya 3,5 M. Pihak panitia Adiwastra Nusantara mengeluhkan tentang anggaran sebesar itu yang memberatkan para pengrajin. Karena para pengrajin juga butuh modal untuk mengisi pameran tersebut.

- Dalam pameran ini para pengrajin mengangkat kearifan budaya Indonesia yang belum banyak masyarakat tahu tentang kain-kain daerah. Panitia Adiwastra Nusantara meminta kepada Wakil Ketua DPR RI untuk bisa melakukan negosiasi terhadap pihak gedung yang dikelola swasta.
- Banyaknya masukan untuk menambah materi pameran seperti keris dan Gamelan demi memaksimalkan acara pameran tersebut. Dengan adanya penambahan materi ini maka Kain Adat ini akan lebih nyata dengan sejarahnya.
- Pada dasarnya acara pameran ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk setiap pengunjung yang hadir, namun kurang dalam faktor dukungan dari Menteri dan BUMN dalam setiap acara pameran Adiwastra Nusantara.

Menanggapi permasalahan yang disampaikan Panitia Adiwastra Nusantara, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Bahwa anggaran terbaru terhadap kebudayaan sudah ada dan DPR RI sudah mengetuk palu untuk anggaran tahun 2017, seharusnya planing budget untuk acara pameran tersebut sudah dipersiapkan setahun sebelumnya.
- Permintaan surat kepada pihak Panitia Adiwastra Nusantara untuk disampaikan kepada pihak terkait supaya bisa meminimalisir budget pameran tersebut.



4. Rabu, 6 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Lembaga Kebudayaan Betawi H. Tatang Hidayat.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan aspirasinya yaitu:

- Pihak Lembaga Kebudayaan Betawi mengungkapkan, bahwa pada tahun 1977 yang dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin menyampaikan bahwa beliau ingin mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai suku asli Jakarta.

- Mengusulkan nama Letkol Mochamad Moeffreni Moe'min menjadi Pahlawan Nasional. Beliau merupakan tokoh pejuang asli dari Betawi dan dinilai mempunyai peran besar dalam Era Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Pada tahun 2004 Lembaga Kebudayaan Betawi sudah membawa nama Usman Berjuri dan Rohyani sebagai Pahlawan Nasional dari Betawi yang berjasa berjuang sebelum Indonesia Merdeka serta sesudah Indonesia Merdeka.
- Beberapa pejuang yang ada didalam penyelenggara aksi IKADA (Ikatan Atletik Djakarta) ingin namanya menjadi Pahlawan Nasional.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Usulan agar nama para pejuang tersebut dijadikan nama jalan seperti nama Ismail Marzuki. Disamping itu, nama Bing Slamet dan Sam Saimun juga harus diusulkan sebagai nama pahlawan dan nama jalan di Jakarta ini.
- Permintaan kepada Lembaga Kebudayaan Betawi untuk membuat surat pengajuan nama-nama pahlawan yang akan langsung diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.



5. **Kamis, 7 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.** Dalam pertemuan tersebut, disampaikan aspirasi yaitu:
 - Telah terjadi keresahan dan keberatan para peneliti dengan diberlakukannya PP 11/2017 yang merupakan turunan UU No. 5/2014, karena telah secara nyata berdampak ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan terhadap peneliti, yang merugikan terutama bagi Peneliti Madya dan Keluarganya, penurunan kapasitas lembaga litbang secara umum kepentingan bangsa Indonesia.

- PP 11/2017 sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU 5/2014 harus terjaga selaras dengan tujuan pembentukan UU No. 5/2014. Materi Pasal 239 PP 11/2017 tidak sejalan dengan jiwa Pasal 90 UU No. 5/2014, dimana pada saat penyusunannya DPR RI berpegang pada prinsip **tidak boleh ada PNS yang dirugikan** terkait dengan batas usia pensiun.
- Kebijakan pemangkasan batas usia pensiun (BUP) bagi Peneliti Madya yang semula diatur 65 tahun sesuai dengan PP 21/2014 menjadi 60 tahun berdasarkan PP 11/2017 tidak perlu terjadi. Hal ini akan mengakibatkan penurunan tajam jumlah peneliti yang sudah sangat sedikit (89 orang/juta penduduk Indonesia dibandingkan dengan 2.000 orang/juta di negara-negara maju), yang bertentangan dengan prakiraan kebutuhan nasional akan jumlah tenaga peneliti dan teknisi yang akan meningkat tajam dalam 2-3 dekade mendatang dalam rangka untuk membangun ekonomi nasional berbasiskan *Total Factor Productivity* (TFP) yang merupakan satu-satunya pilihan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional melebihi 5,2-5,4%/tahun.
- Ketentuan Pasal 354 dan Pasal 362 angka 15 PP 11/2017 mengesampingkan sistem merit yang dianut dalam UU 5/2014, dan secara spesifik bertentangan dengan Pasal 1 angka 22, Pasal 2 huruf l dan Pasal 51 UU 5/2014. Pasal 362 angka 15 PP 11/2017 tidak selaras dan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 dan 19 ayat (3) UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek) yang secara umum mengamanatkan kepada pemerintah untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberi stimulasi dan fasilitasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 Iptek.



- Pemberlakuan PP 11/2017 berdampak buruk terhadap masa depan peneliti dan dunia kepenelitian Iptek Indonesia. Kebijakan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah peneliti secara mendadak dan masif, serta mempengaruhi iklim penelitian di Indonesia di saat sesungguhnya Indonesia membutuhkan peneliti dalam jumlah besar untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan negara dan kemandirian bangsa.
- Mengharapkan bantuan Pimpinan DPR RI, untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari diskriminasi, meminta kepada Presiden RI khususnya kementerian/lembaga terkait pemrakarsa PP No. 11/2017 untuk mengevaluasi, mempertimbangkan kembali, dan merevisi PP 11/2017 tersebut agar tidak merugikan kepentingan peneliti dan kontribusi Iptek dalam percepatan pencapaian tujuan Negara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan diteruskan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait.

6. **Kamis, 7 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (H. Sabrun Jamil).** Dalam pertemuan tersebut, disampaikan tentang:

- Masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi kepada pengungsi Rohingnya.



- Kasus yang baru ini terjadi meliputi pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem yang menimbulkan banyak demonstrasi di berbagai negara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan:

- Pada tahun lalu Tim Otsus DPR RI mengunjungi Aceh untuk melihat pengungsi Rohingnya. Bulan September DPR RI juga ikut dalam Konferensi *World*

Parliamentary Forum On SDGS di Bali yang dihadiri 50 negara ini salah satu point yang dibahas ialah masalah kasus HAM yang terjadi kepada pengungsi Rohingnya dan disepakati oleh beberapa negara terkecuali Myanmar dan India. Pada Forum *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* DPR RI (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Ketua Delegasi) juga membawa isu masalah Rohingnya dengan memaksa untuk terealisasikan akan tetapi Parlemen Myanmar dan Singapura tidak menyetujui karena perlu banyak kajian yang harus diproses lagi sedangkan posisi Malaysia sangat mendukung akan kepedulian terhadap kasus HAM yang terjadi kepada pengungsi Rohingnya. Forum terakhir yang meliputi kasus Rohingnya ini adalah *Inter Paliamentary Union (IPU)* yang berlangsung di Saint Petersburg, Rusia. Hingga akhirnya isu ini diangkat oleh para Parlemen yang mengikuti forum tersebut serta Indonesia ambil peran dalam menyusun pembuatan draft tersebut.

- Adanya analisa bahwa kesengajaan Trump selaku Presiden Amerika untuk melemparkan konflik di Amerika dan Trump membutuhkan vote dari kelompok *evangelical* yang merupakan kelompok Nasrani untuk membangkitkan mahdi mereka.

7. Kamis, 7 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima aspirasi dari Perwakilan Masyarakat mengenai sengketa tanah Gadut, Bukit Tinggi.



8. Rabu, 13 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan antara lain:

- Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon menyampaikan bahwa 2 (dua) orang rekannya Abdoel Mujib (Ketua umum) dan Muhammad Afif (sekertaris jendral) telah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ITE dan SARA serta Pencemaran Nama Baik.

- Istri tersangka dan rekan-rekan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon berharap kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membantu membebaskan dalam kasus ini.
- Sifat penahan ketua umum dan Sekertaris Jendral Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon dilakukan di Jakarta yang harusnya dilakukan didaerah tempat lokasi terdakwa maka ini menimbulkan beberapa aspek pertanyaan kepada rekan-rekan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon.

Menanggapi aspirasi dari KSPI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan untuk segera dibuatkan surat ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk segera bisa ditindak lanjuti kasusnya kepada Kadiskum Humas Polri serta meminta contac person whatsapp perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bank Danamon.



9. **Kamis, 14 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI).** Dalam pertemuan tersebut, disampaikan hal-hal antara lain:
 - Pihak GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa - Majelis Ulama Indonesia) mensosialisasikan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra untuk menghadiri aksi besar yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 di area Monas (Monumen Nasional) pukul 06.00 WIB, didahului dengan Sholat Subuh Berjama'ah.
 - Aksi besar yang bertemakan **INDONESIA BERSATU BELA PALESTINA** ini berlandaskan prinsip-prinsip dasar UUD Negara Republik Indonesia yang kecewa dengan tindakan Negara Amerika mendeklarasikan bahwa Jerussalem adalah ibu kota Israel.

- Dalam sidang KTT OKI yang sedang berlangsung di Turki, pihak GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia) mengusulkan kepada parlemen Indonesia untuk mengundang Negara-negara lain khususnya Negara Islam agar dapat sepahaman untuk mengklaim balik bahwa Jerussalem adalah Ibu Kota Palestina.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan GNPf-MUI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Insya Allah bisa menghadiri aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina bersama dengan Wakil Ketua PDR RI/Korkesra serta menyampaikan pesan kepada Sekjen DPR RI untuk mengundang Komisi I dan Komisi VIII agar dapat ikut serta pada aksi hari minggu nanti.
- Dalam 2 (dua) kali Sidang Rapat Paripurna seluruh Anggota Fraksi menyerukan dukungan untuk Negara Palestina dan mengecam tindakan Negara Amerika. Dalam forum Internasional, DPR RI juga mengirimkan delegasinya pada konferensi Parlemen OKI di Iran untuk membahas masalah Palestina.
- Akan mengusulkan peningkatan kantor perwakilan Indonesia di Negara Palestina agar dapat berkontribusi langsung terhadap Negara Palestina.



10. Sabtu, 23 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Panitia Notaris Muslim Indonesia (NMI). Dalam pertemuan tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Notaris Muslim Indonesia (NMI) meneruskan aspirasi dari rekan-rekan atau elemen masyarakat untuk menindak lanjuti keputusan MK terkait kasus LGBT, zinah serta penghapusan kolom agama di KTP.
- Beberapa kasus yang sering terjadi dalam LGBT ini pihak Notaris Muslim Indonesia (NMI) sangat menegaskan keseriusan dalam perumusan KUHP karena untuk KUHP ini sangat lama prosesnya sehingga rekan-rekan Notaris Muslim Indonesia (NMI)

meminta kepada DPR RI supaya melanjutkan KUHP untuk diproses secepatnya kalau tidak dibuatkan Perpu. Akan adanya salah persepsi untuk dibagian UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 2 “ perkawinan itu adalah kemauan antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri “ karena adanya kutipan “ suami-istri” ini bisa disalah artikan.

- Soal isu yang sedang berkembang belakangan ini terkait penghapusan kolom Agama di KTP ini berarti Negara Indonesia tidak sepaham dengan Pancasila Sila ke-I.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan NMI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Terkait LGBT dan penghapusan kolom “Agama“ ini terkait keputusan MK akan dievaluasi kembali.
- Adanya ruang kosong didalam Undang-Undang ini bisa diusulkan secara detail untuk hukum bahkan KUHP. Kekosongan Hukum ini bisa diisi secepatnya karena lebih baik dari pada opini-opini yang hanya sebatas berita simpang siur.
- Meminta surat kepada Notaris Muslim Indonesia (NMI) terkait isu yang berkembang yaitu LGBT agar diteruskan kepada Komisi III.
- Berharap kepada Notaris Muslim Indonesia (NMI) untuk membantu merealisasikan setiap apa yang sedang terjadi dalam kasus ini. Karena pada dasarnya perkawinan yang bersifat normal ialah Pria dan Wanita. Jadi disini bukan hanya Agama Islam saja yang melarang menikah sesama jenis tetapi hampir seluruh Agama juga melarangnya jika terjadi maka ini akan memicu konflik.
- Menentang terkait penghapusan kolom “Agama” di Kartu Tanda Penduduk karena kita berbeda dengan Negara lain dan ini akan merugikan kepada setiap orang. Pada tahun 80’an sudah pernah ada pembahasan tentang masalah kepercayaan hingga Partai PPP walk out karena kerasnya penentang pada saat itu.



III. Masa Persidangan III

1. Selasa, 9 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Alumni Children's Camp, Thailand dan Vladivostok. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:
 - Ucapan selamat kepada para peserta yang telah berhasil dalam mengikuti program International children's camp ROSATOM School Rusia serta ingin menjalin kembali kepada pihak ROSATOM School untuk program selanjutnya.
 - Terealisasinya program ini berkat kerja sama dalam kunjungan 2 (dua) tahun lalu ke Vladivostok Negara Rusia.



2. Rabu, 10 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Bapak Adhyaksa Dault dan Pengurus Kwarnas Pramuka. Dalam pertemuan tersebut disampaikan aspirasinya yaitu:
 - Pada tahun 2017 dalam acara RAIMUNAS dilaksanakan Pramuka tidak menggunakan anggaran dari Kemempora. Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita mendapat anggaran pertahun untuk RAIMUNAS sebesar 13 Miliar.
 - Kurang supportnya Kemempora terhadap acara RAIMUNAS ini menjadi polemik terhadap Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Anggaran yang diajukan kepada Kemempora dan Komisi X tidak ada balasanya/tanggapannya.
 - Pada bulan Maret nanti akan dilaksanakan Munas Anggota Kwarnas dari daerah-daerah serta meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa menjadi pembicara dan memberi pengarahan kepada anggota Kwarda di Bogor nanti.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Pramuka ini merupakan organisasi yang sangat *fast respon* dalam melakukan tindakan musibah bencana alam bahkan sampai membantu terhadap warga Rohingya.
- Meminta surat terkait anggaran agar bisa dimonitoring kembali untuk penggunaannya dan diteruskan kepada Komisi X serta meminta bukti history penganggaran yang sudah pernah terealisasi.
- Mengusahakan akan memenuhi undangan dalam acara Kwarda bulan Maret nanti di Bogor.



3. Rabu, 10 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Dalam pertemuan tersebut disampaikan aspiranya, antara lain:

- Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.1 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindakan-tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*: Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 no. 44, dan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*: Stb. 1927 no.227 yang merupakan peraturan yang berlaku sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Baik HIR maupun Rbg Keduanya mengatur hal yang sama yaitu tentang hukum acara perdata, hanya wilayah hukum berlakunya yang berbeda. Namun demikian antara keduanya tidak dapat disatukan dalam arti satu berlaku untuk

seluruh Indonesia, karena secara formal sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mempersatukan HIR dan RBg untuk diberlakukan di semua wilayah yang sama. Karenanya **sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih dualisme.**

- Hukum acara perdata yang berlaku saat ini selain masih bersifat dualisme juga pluralisme, karena selain diatur dalam **HIR dan Rbg yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda**, juga ditambah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tentang acara perdata yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan. Seperti misalnya antara lain: UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Bahkan terdapat beberapa peraturan yang merupakan ketentuan hukum materiil tetapi didalamnya juga mengatur hukum acara sebagai hukum formil seperti misalnya UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Elektronik dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap tercapainya ketertiban peraturan hukum dan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum.
- Mengingat RUU Hukum Acara Perdata telah sejak lama dirumuskan (setidaknya sejak tahun 1987) dan telah berulang kali mengalami penyempurnaan juga telah masuk didalam daftar prolegnas 2015-2019, maka **pengesahan RUU Hukum Acara Perdata menjadi Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata perlu untuk segera dilakukan sebagai upaya pembaruan hukum acara perdata nasional**, karena hukum acara perdata yang sekarang berlaku tidak hanya merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda tetapi juga bersifat pluralisme, keadaan demikian tidak mencerminkan kepastian hukum. Dengan diundangkannya RUU Hukum Acara Perdata dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka akan dimiliki hukum acara perdata yang terkodifikasi dan unifikasi, sehingga kepastian hukum dan ketertiban hukum dapat terwujud. Hal ini sangat diperlukan dalam praktik peradilan di Indonesia.
- Mengingat bahwa RUU Hukum Acara Perdata telah masuk dalam daftar Prolegnas RUU tahun 2015-2019 pada urutan Nomor 41 yang Naskah Akademik dan RUUnya disiapkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak termasuk di dalam Daftar Prolegnas 2018 tertanggal 05 Desember 2017; maka kami **mengusulkan agar dapat kiranya RUU Hukum Acara Perdata dimasukan ke dalam Daftar Prolegnas tahun 2018**, karena sangat diperlukan dalam praktik peradilan guna mewujudkan ketertiban pengaturan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan ADHAPER, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Aspirasi RUU tentang KUHP acara perdata bisa dijadikan Prolegnas menjadi prioritas tahun 2018 atau maksimum di tahun 2019. Ini merupakan hal yang sangat penting karena DPR RI sedang berkonsentrasi untuk RUU KUHP Pidana, karena KUHP ini masih dalam versi Belanda. Tetapi di BALEG sendiri juga diperjuangkan apa yang sedang urgent untuk saat ini
- Meminta surat kepada pihak Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) supaya bisa diteruskan kepada Ketua BALEG dan Ketua Komisi III agar menjadi perhatian khusus.



4. Rabu, 24 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Pemuda Tani dari Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut dikemukakan bahwa Pemuda Tani dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ingin mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada bulan Maret 2018 ini untuk membahas program-program yang ingin disampaikan kepada pihak HKTI karena pada dasarnya Pemuda Tani selalu berpisah dalam aspek program seperti Anak dan Induk sebab Pemuda Tani dan HKTI ingin sekali sejalan pemikiran dalam mengedepankan sektor tani di Sumatera Utara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:



- Apresiasi kepada Pemuda Tani yang berinisiatif mendatangi para petani untuk menyampaikan program atau tindakan yang akan direalisasikan.
- Dalam sektor pertanian saat ini, peran pemerintah kurang maksimal dalam membantu karena prioritas Pemerintah Daerah tidak pada pihak para tani lain hal dengan wilayah Sulawesi Tengah yang didukung penuh oleh Pemerintah Daerah karena Ketua HKTI-nya adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

5. **Warga Tangerang Selatan Kamis, 8 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima.** Dalam pertemuan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

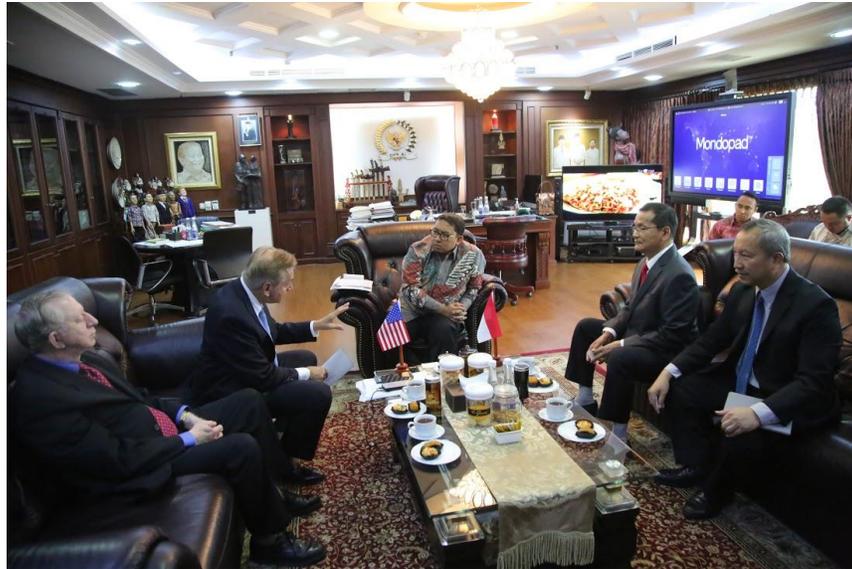
- Melaporkan akan mengadakan penolakan terhadap LGBT yang sedang marak terjadi di Indonesia. Penolakan LGBT ini adalah melalui Partai Politik yang ada di DPR RI terutama melalui Partai Gerindra.
- Mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk hadir dalam Acara Tangerang Selatan menolak adanya LGBT yang diadakan pada hari Minggu, 11 Februari 2018.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Terkait KUHP masih panjang tetapi hampir semua mayoritas fraksi yang berada di DPR menyetujui bahwa LGBT ini suatu masalah, kaum LGBT ini memang sudah ada kelompoknya dan sangat meresahkan tetapi karena banyaknya kampanye atau penolakan terkait LGBT ini akan memperkuat bahwa mayoritas masyarakat peduli terhadap kasus yang sedang terjadi ini.

- Berhalangan hadir pada acara tersebut dikarenakan ada kunjungan ke Sumenep, Madura dan mungkin akan memberitahukan kepada anggota lain dari Gerindra untuk menghadiri acara tersebut.
6. **Selasa, 13 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima President Of Inovation Strategies International/Chair Of The Janus Board Of Global Development.** Dalam pertemuan tersebut disampaikan mengenai :
- Penawaran sebuah *Chip* untuk membantu mengamankan suatu lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta bisa juga untuk pengawasan suatu Pemilihan Umum, *Chip* ini merupakan generasi terakhir yang ditawarkan karena mampu meminimalisir kecurangan yang dilakukan dalam Pemilu.
 - Kapal Laut untuk Pertahanan Negara dengan *system* yang terbaik dari Negara Amerika karena selama ini Indonesia memakai Kapal Laut kelas-2 serta juga Kapal Laut ini mempunyai kemampuan yang lebih bila terlibat di Laut Cina Selatan dan mampu menjaga perairan Indonesia dengan waktu yang *flexible* dikarenakan *size* kapal 70 M².

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa penawaran yang diajukan akan diteruskan kepada Presiden untuk keamanan suatu Lembaga maupun Negara.



7. **Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Indonesia.** Dalam pertemuan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Perkembangan dan kegiatan yang telah tercapai selama beberapa waktu belakangan ini. Kegiatan yang sudah berlangsung adalah IMAMI CUP Liga Futsal se-jawa yang selesai pada bulan Desember 2017 serta *road show* ke beberapa sekolah yang berada di Sumatera Barat, pengabdian kepada masyarakat dan simulasi SNMPTN.
- Pada tanggal 22 April 2018, akan dilaksanakan Minang Culture Festival dan *pra-event* tanggal 11 Maret 2018, di Tanah Abang blok D.
- Mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc, agar bisa hadir dalam acara Minang Culture Festival pada tanggal 22 April 2018. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM menyampaikan :
 - Ucapan selamat karena kegiatan Minang Culture Festival 2017 berlangsung dengan baik serta banyak diminati oleh orang-orang rantau.
 - Akan mengagendakan dalam acara Minang Culture Festival 2018 apabila waktunya tepat serta mendukung kegiatan tersebut.



8. **Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Gerakan Pemuda Al Washliyah.** Dalam pertemuan tersebut, disampaikan beberapa hal yaitu:

- Rasa keamanan yang terjadi di kalangan masyarakat sudah mulai dirasa berkurang. Ancaman yang sedang marak terjadi kepada Ulama tetapi masih bisa dikendalikan oleh pihak Kepolisian. Kita masih merasa terancam oleh ancaman-ancaman yang masih terjadi karena apabila nanti menimbulkan korban maka media asing akan memberitakan tentang keamanan yang terjadi di negara ini.
- Gerakan Pemuda Al-Washliyah telah mengirim surat kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa menghadiri acara Sosialisasi 4 Pilar yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Selain di Medan, Basis di Cirebon juga

ingin Mensosialisasikan 4 Pilar dan berharap dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Kasus ancaman yang sedang marak terjadi ini akan disampaikan kepada pihak terkait. Belum lama telah disampaikan kepada wartawan/*pers* bahwa ancaman ini sangat berbahaya.
- Terkait Sosialisasi 4 Pilar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di Medan, Sumatera Utara akan diusahakan untuk hadir dan akan melihat jadwal terlebih dahulu.



9. **Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.** Dalam pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Akan mengadakan Mukernas di Sangata, Kalimantan Timur dan turut mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.
- Menghimbau kepada calon-calon Gubernur dari Partai Gerindra untuk lebih bersahabat apabila ingin didukung oleh pihak DPP PPMI.

- Banyak TKI yang tidak melapor kepada KBRI Malaysia untuk didata sebagai warga Indonesia bekerja disana. Para TKI enggan melapor dikarenakan biaya yang lumayan mahal serta takut dipulangkan, khususnya untuk TKI yang sudah lama tinggal di Malaysia untuk melapor ke KBRI.



Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Akan dilihat terlebih dahulu jadwal agendanya.
- Terkait kurang bersahabatnya para calon Gubernur dari Partai Gerindra akan diteruskan ke Partai Gerindra.
- Akan menindak lanjuti dengan meneruskan kepada KBRI mengenai permasalahan TKI.

10. **Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Panitia 17 th Islamic Book Fair.** Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Pelaksanaan *Event* 17 Tahun Islamic Book Fair pada tanggal 18-22 April 2018 merupakan *event* pesta buku Islam tahunan yang paling besar diselenggarakan di Indonesia yang jumlah pesertanya mencapai 190.000 orang pada tahun 2017 dan akan diprediksi lebih banyak untuk tahun ini karena minat pembaca semakin bertambah.
- Meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membuka acara 17 Tahun Islamic Book Fair tersebut, serta memberikan saran-saran untuk panitia maupun peserta.
- Dalam *event* ini sudah dipesan sebanyak 305 stand dengan 35 rangkaian acara yang meliputi bedah buku. Panitia 17 Tahun Islamic Book Fair masih membutuhkan *sponsorship* untuk pelaksanaan *event* tahunan ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Akan melihat jadwal agendanya terlebih dahulu. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa dirinya pecinta buku dan juga sebagai penulis serta mempunyai beberapa perpustakaan karena buku merupakan bentuk watak bangsa.
- Belum lama mendapatkan buku Islam dari penulisnya langsung yaitu Yusuf Qardhawi. Perkembangan buku Islam juga harus diperhatikan karena akan ada banyak dampak positif untuk pemikiran bangsa.
- Ada salah satu buku sangat bagus yang bercerita tentang ilmuwan-ilmuwan Islam pada jaman dahulu yang ternyata banyak dari Uzbekistan dan buku ini langsung diterbitkan oleh Pemerintah Uzbekistan.



11. Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Konsultasi tentang Mukhtar IMM yang akan dilaksanakan pada tanggal 1- 6 Mei 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara dan membutuhkan masukan dari Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk dijadikan gagasan baru yang akan dilahirkan dari Mukhtar tersebut searah dengan kondisi kebangsaan ini.
- Mukhtar IMM akan dihadiri dari seluruh Indonesia serta mengharapkan kedatangan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.
- Meminta mediasi Ketua Partai Gerindra Pak Prabowo memberikan masukan tentang IMM kedepannya, karena IMM masih jatuh hati kepada Pak Prabowo dengan jiwa kebangsaan yang sangat dijunjung tinggi.
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menanyakan penjelasan tentang UU MD3.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan IMM, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Berharap agar organisasi IMM ini bisa menjadi panutan kepada rakyat karena peran IMM bisa untuk merefleksikan pola bermasyarakat.
- Mendukung terselenggaranya acara Muktamar dan akan diagendakan terlebih dahulu untuk hadir dalam acara tersebut serta permintaan mediasi dengan Prabowo akan disampaikan.
- Tidak setuju dengan adanya perubahan Undang-Undang MD3, disamping itu tidak mengikuti proses perubahan RUU tersebut karena ada di Baleg dan keputusan internal Fraksi Gerindra tidak pernah mengusulkan hal seperti itu.



12. **Senin, 19 Februari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara.** Dalam pertemuan tersebut dikemukakan antara lain:

- Mengundang Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk menghadiri acara Milad 1 (satu) Tahun Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018 serta pihak Bang Japar berencana memberikan *award* kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Anggota Dewan Terpopuler dan peduli gerakan-gerakan umat islam.
- Wilayah Bang Japar yang meliputi Jabodetabek berusaha membantu mengamankan keamanan di wilayahnya dengan jumlah anggotanya berkisar 5000 untuk jawara dan 500 untuk pengacara serta sudah ada beberapa cabang Bang Japar di daerah-daerah seperti Bandung, Tasik, Cianjur, dan selanjutnya akan dibangun cabang di daerah lain.



Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpokam menyampaikan:

- Akan mengagendakan acara Milad 1 (satu) Tahun Bang Japar dan menginginkan adanya pertemuan dengan kordinator Wilayah Bogor.
- Peran Bang Japar ini sangat bagus dan pada saat pengawalan Pilkada kemarin di DKI Jakarta peran Bang Japar sangat menonjol dalam mengawasi jalannya Pilkada serta menjaga ketentraman di wilayahnya.

13. **Jumat, 2 Maret 2018, menerima Audiensi Alumni SMA Negeri 31 Jakarta.** Dalam pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta bantuan keadilan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpokam dimana ibu Tara dituding menyebarkan berita *hoax*. Bukti penahanan kurang kuat karena bukti yang menjadikan ibu Tara menjadi tersangka dalam *postingan* di “*twiter*” membuat keluarga ingin memulangkan terdakwa yang dianggap tidak bersalah.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Alumni SMA Negeri 31 Jakarta tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpokam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpokam menyampaikan bahwa kejadian ini sama dengan kejadian yang dialami kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpokam, diposting tersebut menyudutkan Wakil Ketua DPR RI/Korpokam merupakan sebagai salah satu anggota MCA (*Muslim Cyber Army*) oleh Ananda Sukarlan dan akan dilaporkan ke Bareskrim Polri.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpokam meminta agar segera dibuat surat resmi kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpokam serta bukti yang kuat untuk bisa dilakukan penangguhan penahanan.



4. Masa Persidangan IV

1. Senin, 5 Maret 2018, Pertemuan dengan Wakil Ketua BPK RI (Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.I. Dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dana OTSUS Papua.
2. Kamis, 8 Maret 2018, menerima audiensi dengan Pengurus DPD IKM Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut, Pengurus DPD IKM menyampaikan :
 - Pembahasan tentang isu kemanusiaan yang sedang marak terjadi di negara Islam. Serta sering dibantunya Indonesia dalam forum-forum internasional.
 - Ingin terus bekerja sama dalam hubungan bilateral antara kedua negara serta dalam pariwisata Negara Iran mengajak Indonesia bekerja sama untuk memajukan destinasi wisata yang berkunjung setelah *Umrah* agar juga mengunjungi Negara Iran.
 - Pembicaraan soal kebijakan isu nuklir di Negara Iran.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa kontribusi Negara Iran sangat tinggi serta sangat diapresiasi dalam membantu misi perdamaian apalagi untuk Negara Palestina dan Pengungsi Rohingya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dalam hubungan Indonesia dengan Iran di berbagai forum internasional sangat baik dan dalam bidang wisata Iran mempunyai beberapa situs sejarah yang sangat menarik dan harusnya bisa dikunjungi seperti makam Imam Gazali merupakan salah satu imam yang penting bagi masyarakat Indonesia.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan soal isu nuklir yang berada di negara Iran yang sempat jadi polemik bahkan sampai dunia internasional ini sempat mendapatkan embargo ekonomi karena pengembangan energi nuklir tersebut.



2. Selasa, 13 Maret 2018, menerima audiensi Forum Nasional Profesor Riset (Prof. Dr. Syamsuddin Haris)

Dalam pertemuan tersebut, Forum Nasional Profesor Riset (Prof. Dr. Syamsuddin Haris) menyampaikan :

- Masukan perbaikan butir pasal yaitu Bab. V Kelembagaan pasal 38, Bab. VI Sumber Daya pasal 44, pasal 45, Bab. VIII Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu Pembinaan pasal 61.
- Perlunya Pembentukan Dewan Kebijakan Iptek dan Inovasi (DK-IPTEKIN), dan Badan Riset Ilmu Pengetahuan Nasional (BRIPN).
- Diharapkan adanya Intervensi Pemerintah terhadap IPTEK untuk mengatasi ketertinggalan yang berkepanjangan.
- Diperlukan Budget yang memadai dalam anggaran IPTEK agar melibatkan pihak Swasta sebagai sumber dana riset dan penelitian.
- Mohon dukungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat memperjuangkan dalam perubahan UU Nomor 18 Tahun 2002. tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan penjelasannya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan masukan ini dapat dimasukkan dalam pembahasan RUU SISNAS-IPTEK dan menyarankan agar dari Persatuan Guru Besar FORUM NASIONAL PROFESOR RISET (FNPR) membuat suatu kajian tentang masukan aspirasinya.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan meneruskan masukan ini kepada Pimpinan Pansus RUU SISNAS IPTEK yang merupakan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.



3. **Senin, 19 Maret 2018, Menerima audiensi Pengurus Pusat Hidayatullah, Ketua Umum Nashirul Hak, Lc, M.A.**

PERTEMUAN TERTUTUP.



4. **Rabu, 21 Maret 2018, menerima audiensi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Periklanan (KIARA).**

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Periklanan (KIARA) menyampaikan :

- Masih harus adanya perbaikan terhadap dalam RUU Pertanahan, karena masih belum melingkupi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- RUU Pertanahan ini masih kurang menjamin hak perempuan dalam mengkaitkan/melibatkan pengawasan hak milik karena merujuk ke-3 (tiga) Undang-undang yang meliputi UU No. 27 Tahun 2007 Junto UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016 dan UU No. 32 Tahun 2002 disalah satu Undang-undang masih kurang spesifik dalam penjelasan Wilayah Pesisir.
- Ada 4 (empat) Hak yang harus diperhatikan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang No.27 Tahun 2007 meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian SDM. Tetapi yang terjadi pada tahun 2017 ada 659 kasus di seluruh wilayah Indonesia.
- Ingin mendukung Undang-undang tentang Pertanahan ke semua Fraksi-fraksi agar permasalahan bisa diajukan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan kasus yang terjadi saat ini.
- Konsentrasi Serikat Perempuan dalam menyikapi RUU Pertanahan untuk meminta Hak Kesetaraan dalam Pertanahan karena adanya ketimpangan Hak milik dalam data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri perempuan hanya memiliki 15% dari keseluruhan data yang terkumpul.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa RUU Pertanahan sudah menjadi Prolegnas, ini sudah menjadi Prioritas dan harusnya selesai pada tahun 2018.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan bahwa yang harusnya dimiliki oleh setiap perorangan dalam mengelola pertanahan hanya 2 Hektar akan tetapi ada beberapa orang yang hingga puluhan Hektar dimiliki.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan agar membuat dokumen atau *paper* supaya bisa diteruskan kepada pihak yang terkait. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan terhambatnya Undang-undang ini akibat adanya pergantian Menteri yang sebelumnya Ferry Mursyidan digantikan Sofyan Djalil sehingga penyelesaian RUU Pertanahan menjadi *slow down* karena masih ada banyak pertimbangan masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah tidak mau diganggu gugat dalam RUU Pertanahan ini.



5. Rabu, 21 Maret 2018, menerima audiensi Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Minangkabau, Jakarta Raya

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya menyampaikan :

- Pihak dari Keluarga Mahasiswa Minang merasa disingkirkan oleh pihak pengelola Gedung/mess Anjungan Sumatera Barat, Jakarta Raya serta apabila ingin menempati kembali pihak dari Keluarga Mahasiswa Minang harus membayar Royalti sebesar Rp. 80 juta/tahunnya.
- Dalam kasus ini sangat berbeda dengan halnya daerah di D.I.Yogyakarta, Bandung dan Bogor dimana mereka semua difasilitasi oleh Pemerintah setempat, oleh sebab itu pihak Keluarga Mahasiswa Minang meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membantu permasalahan tersebut.
- Dalam waktu dekat ini akan melakukan Rapat Kerja seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta.
- Pihak dari Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Minangkabau meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk menjadi Pembina dari KMM.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa soal kasus ini sudah terdengar, tetapi memang belum ada kejelasannya bahwa Gedung tersebut dikelola oleh swasta atau sudah beralih tangan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memerlukan pendataan keseluruhan anggota dari Keluarga Mahasiswa Minang agar nanti bisa dibantu untuk tempat Rapat Kerja KMM.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan kesediaan membina Keluarga Mahasiswa Minang.



6. **Senin, 9 April 2018, menerima audiensi dengan Ketua Umum/Pengurus Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara Republik Indonesia.**

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum/Pengurus Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara Republik Indonesia menyampaikan :

- Terbentuknya Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara didasarkan adanya suatu pemahaman ikatan yang kuat atas kebangsaan kita. Pada tahun 2014 pemerintah berkeinginan untuk mengikut sertakan peran masyarakat dalam Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara.
- Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara membawa surat dukungan kepada Prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024 serta membacakan surat dukungan tersebut di depan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan langsung diserahkan surat dukungan tersebut.
- Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara akan membangun posko Format (Forum Aspirasi Masyarakat) yang pertama di Solo, Jawa Tengah yang akan rampung dalam waktu dekat ini.

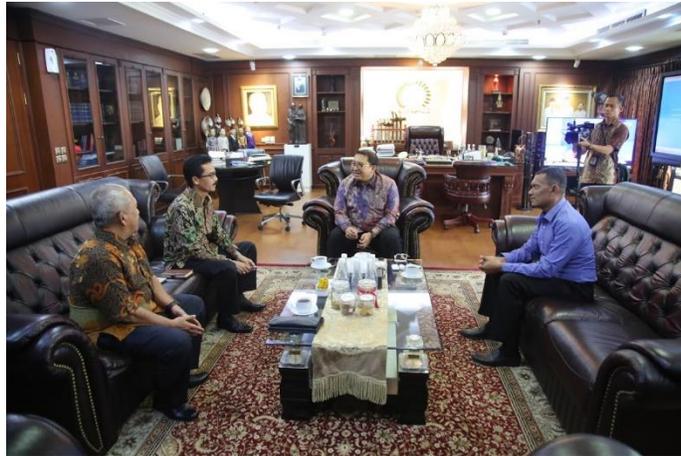
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyoroti soal Bela Negara, Indonesia memperingati dengan hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 14 Desember yang memaknai sebagai “ upaya masyarakat mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh Belanda” serta Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sangat mendukung kepada Ikatan Kebangsaan dan Bela Negara yang sangat kompleks.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Kebangsaan Bela Negara karena partisipasi dalam mendukung Pimpinan Partai Gerindra sebagai calon Presiden 2019-2024 dan surat dukungan akan disampaikan dalam pertemuan dekat ini.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan ketersediaannya hadir, apabila nanti ada peresmian posko di Solo, Jawa Tengah yang nanti akan dijadwalkan terlebih dahulu.



7. **Senin, 9 April 2018, menerima audiensi dari Anggota DPRD Aceh.**

PERTEMUAN TERTUTUP.



8. **Senin, 9 April 2018, Menerima audiensi dari Panitia Pengusul Ruhana Kuddus sebagai Pahlawan Nasional**

Dalam pertemuan tersebut, Panitia Pengusul Ruhana Kuddus menyampaikan :

- Kuddus untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional yang berasal dari Agam, Sumatera Barat.
- Sehubungan dengan pengusulan tersebut maka diperlukannya dukungan dari Lembaga-lembaga Negara dan Organisasi Nasional serta pentingnya dukungan yang kuat dari Pimpinan DPR RI, MPR, DPD, Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).
- Berhubungan dengan persoalan tersebut maka pihak dari Panitia Pengusul Ruhana Kuddus sebagai Pahlawan Nasional telah membawa Permohonan Surat dukungan dengan dilengkapi Riwayat hidup (Beliau) yang sudah ditulis dan dikutip.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Ruhana Kudus yang merupakan tokoh perempuan asal Padang, Sumatera Barat jauh sebelum kemerdekaan telah berjuang memberdayakan perempuan di masanya lewat organisasi Amai Setia dan yang tak kalah penting adalah perjuangan di bidang Pers. Ruhana Kuddus, merupakan wartawan perempuan pertama sekaligus Pemimpin Redaksi pertama di jamam Hindia Belanda lewat koran bernama Soenting Melaju (Sunting Melayu) yang terbit pada tahun 1911 hingga tahun 1921. Semua itu juga pernah ditulis oleh sejarawan dan tokoh Pers Sumbar

Hasril Chaniago dan Mustika Z. Sehingga usulan tersebut wajib dipertimbangkan untuk menjadi Pahlawan Nasional pada bulan November mendatang.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan yang perlu dinilai dari kepahlawanannya adalah mereka yang berjuang membangun kesadaran nasional, membangun pergerakan merebut kemerdekaan, punya kontribusi langsung. Kalau pasca kemerdekaan atau tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan tidak harus menjadi pahlawan nasional, namun bentuk penghargaan lainnya atau dengan kata lain Pahlawan Nasional harus punya ciri-ciri keterlibatan di dalam merebut kemerdekaan, membangun kesadaran nasional, melawan secara fisik, intelektual, diplomasi. Ruhana Kuddus jelas punya *track record* itu semua. Saya tidak tahu kandidat atau tokoh yang dicalonkan lainnya. Jangan sampai yang tidak memiliki *track record* itu malah dijadikan Pahlawan Nasional. Jadi harus benar-benar dikaji semuanya.



9. **Senin, 16 April 2018, menerima audiensi dari Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).**

Dalam pertemuan tersebut, Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyampaikan :

- Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ingin membicarakan terkait Pemilu dan Pilpres yang akan dilaksanakan 2019.
- Meminta klarifikasi kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang didatangi oleh anggota Pemuda LIRA dengan tampilan lusuh/tidak sopan yang mengganggu Pemuda LIRA Pusat.
- Pemuda LIRA mempunyai 21 DPW se-Indonesia terbagi dari 85 Kabupaten dan Kota. Menyikapi Pemilu 2019 nanti Pemuda LIRA berpandangan secara Kuantitas karena Pemuda LIRA bertujuan untuk “kaum Millennial” tidak golput dalam perhelatan tersebut. Dalam waktu dekat ini Pemuda LIRA akan

mendeklarasikan *tagline* “ Kaum Millennial Anti Golput” yang akan diselenggarakan di Medan, 21 April 2018 serta meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sebagai Dewan Penasihat Pemuda LIRA.

- Merebaknya isu PKI yang sedang berkembang akan mempengaruhi pola masyarakat.
- Lemahnya kualitas pelajar-pelajar generasi sekarang membuat setiap guru lebih berhati-hati dalam bertindak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan :

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan terkait klarifikasi Pemuda LIRA yang bertemu dengannya pada tahun 2016, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam merasa tidak mengetahuinya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan kepada Pemuda LIRA agar lebih substantif terhadap keadaan yang sedang terjadi serta membuat pandangan-pandangannya dan mengeluarkan pendapat kepada organisasinya terlebih ada pro dan kontra itu menjadikan kuatnya elemen suatu organisasi.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan terkait isu PKI harus adanya kewaspadaan dikalangan masyarakat. Ideologi PKI sangatlah kuat pada tahun 1948 dan puncaknya pada tahun 1965 yang ingin mengganti Ideologi Bangsa Indonesia akan tetapi pada tahun 1966 MPRS mempunyai ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 sehingga tidak perlu khawatir dengan nantinya ada pergerakan PKI kembali.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan persoalan anak memang harus diperhatikan dengan *training* untuk membuat mental usia dini mempunyai tameng atau bekal untuk kejenjang berikutnya.



10. Senin, 16 April 2018, menerima audiensi BEM Universitas Lampung (UNILA)

Dalam pertemuan tersebut, BEM Universitas Lampung (UNILA) menyampaikan:

- Universitas Lampung akan melaksanakan Stadium General Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tema “Pendidikan Sebagai Garda Terdepan Moralitas Bangsa dan Integritas Kepemimpinan Masa Depan” pada Tanggal 24 April 2018, dan dimohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dapat mengisi acara tersebut.
- Universitas Lampung menjadi tempat koordinator Forum Perempuan Indonesia serta Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dimohon untuk mengisi muatan tentang motivasi semangat perempuan dalam parlemen di forum tersebut.
- Meminta masukan-masukan di-Era Kepemimpinan Millineal dan keberlangsungan mahasiswa ini kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan melihat agendanya terlebih dahulu dan akan dikabarkan untuk kehadirannya dalam acara tersebut.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan kelahiran pada mahasiswa tahun 1996 tidak merasa Era-Transisi pada saat itu yang terjadi banyak konflik di Negara Indonesia serta semoga di BEM Unila bisa lebih kritis menanggapi kepemimpinan pada saat ini.



11. Selasa, 17 April 2018, menerima audiensi dari Vice President of the Cambodia National Party (CNRP) Bersama AIPA.

Dalam pertemuan tersebut, Vice President of the Cambodia National Party (CNRP) Bersama AIP menyampaikan :

- Memohon kepada Parlemen Indonesia untuk membantu mengawasi propaganda dalam Pemilu di Kamboja.
- Negara Kamboja sedang terjadi konflik yang merupakan tindakan melawan demokrasi.
- Terjadinya pembubaran Partai Oposisi sekaligus kriminalisasi Anggota Parlemen dari Partai Oposisi Cambodia National Rescue Party.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan berusaha untuk membantu dalam mengawasi keberlangsungan Pemilu di Kamboja dan akan membuat semacam surat untuk pemerintah agar proses demokrasi berjalan dengan baik. Pembubaran Partai Oposisi yang dinilai merugikan akan berdampak negative bagi Demokrasi suatu negara serta peranan Indonesia meyakinkan untuk Kamboja terus memberi pandangan kepada Partai-partai sekaligus Partai Oposisi supaya bisa *euphoria* kembali dalam acara Pemilihan Umum tersebut.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyayangkan atas dipenjarakannya Pemimpin Oposisi karena kasus pengkhianatan yang seharusnya ini bukan sebagai ancaman melainkan demokrasi yang sangat baik bagi suatu negara.



12. Senin, 23 April 2018, menerima audiensi The Korean Federation of Young Farmers Associations (KFYFA) the Republic Korea.

Dalam pertemuan tersebut, The Korean Federation of Young Farmers Associations (KFYFA) the Republic Korea menyampaikan :

- The Korean Federation of Young Farmers Associations mengajak kepada Petani Indonesia untuk berkembang dan belajar bersama dalam sektor pertanian.
- Menandatangani kerja sama (MOU) dalam sektor perkembangan pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa kita harus belajar dari mereka karena KFYFA bisa bertani secara efektif dan efisien kemudian mereka juga menghasilkan produk serta ketika dipasarkan mendapatkan harga yang baik dan adanya insentif harga yang baik, menjadikan para petani muda dari Korea Selatan ini yang harus dipelajari oleh Pemerintah Indonesia.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan Negara Korea yang sangat mengedepankan dalam sektor pertanian, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam pernah belajar pada tahun 1994 di Saemaul Undong dalam bidang pertanian karena melihat baiknya sistem pertanian disana yang menerapkan 3 spirit diligence, self reliance dan cooperation oleh Presiden Korea Selatan yang membuat para pemuda Korea Selatan sangat bersemangat dalam bidang pertanian



13. Rabu, 25 April 2018, menerima audiensi Wayang Orang Kautaman TMII.

Dalam pertemuan tersebut, Wayang Orang Kautamaan TMII menyampaikan :

- Kelompok Wayang Orang Kautaman TMII menyampaikan untuk membawa kesenian ini keluar negeri. Wayang Kautaman yang memiliki konsep berbeda dengan Wayang orang lainnya.

- Kurangnya daya minat masyarakat terutama anak muda dalam melihat pertunjukan Wayang Orang yang disimpulkan Wayang terkhususkan untuk kalangan usia lanjut.
- Kelompok Wayang Orang Kautaman TMII sudah menampilkan 4 (empat) kali show dari tahun 2015 hingga saat ini. Dalam proses pembentukan karakter hingga *show off* lamanya 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan sebelum menjadi pementasan.
- Dalam waktu dekat ini Wayang Orang Kautaman TMII akan melakukan show di Austria 3 kali show, Slovenia 1 Show dan Paris 1 Show dan Kelompok Wayang Orang Kautaman TMII sedang melobby untuk show di London, Jerman dan Belanda.
- Kelompok Wayang Orang Kautaman TMII mohon arahan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pertunjukan kesenian Wayang Orang Kautaman merupakan salah satu dari upaya mempromosikan kebudayaan Indonesia, jika seni dikemas secara baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan untuk membantu yang lebih lanjut adalah Kedutaan Besar masing-masing Negara karena mereka mempunyai *spot/tempat* pertunjukan yang bisa diajukan untuk pementasan. Ada 2 (dua) tempat wisma atau tempat yang berada di Negara tersebut bisa disewakan oleh KBRI.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan untuk Kelompok Wayang Orang Kautaman TMII dapat kerja sama dengan masing-masing KBRI dan BUMN. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam pada tahun 2011 membuat misi kebudayaan dengan membawa Keris ke Dunia serta Wakil Ketua DPR RI merupakan Ketua Umum Perkerisan Indonesia.



14. **Rabu, 25 April 2018, menerima audiensi SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah.**

Dalam pertemuan tersebut, SMA Islam Alam dan Sains Al Jannah menyampaikan :

- Sekolah SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah pada bulan Juli akan mewakili Indonesia untuk menghadiri acara konvensi lingkungan hidup internasional di Austria.
- SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah akan membawa karya “tempat sampah penghasil listrik” dalam perhelatan konvensi tersebut serta melakukan pameran budaya, kunjungan edukasi dan pameran karya.
- SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membantu dalam segi keuangan karena mahalnya biaya untuk perjalanan Austria .

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mendukung dan mengapresiasi, karena ini membawa nama baik Indonesia serta bagi siswanya sendiri jadi pengalaman yang tidak dilupakan. *Ekspose* internasional sejak dini pada masa pembentukan, sangat baik yang akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul, tidak minder, *self confidence*-nya tinggi, dan bisa bicara di forum-forum internasional.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan melihat terlebih dahulu proposal SMA Islam Alam dan Sains Al-Jannah yang diajukan.



15. Kamis, 26 April 2018, menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan :

- Pembahasan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- KSPI meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing terkait dengan adanya TKA *unskill* berasal dari Negara China yang menjadikan Tenaga Kerja Indonesia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan di Negaranya sendiri.
- KSPI mengetahui DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap TKA, akan tetapi kelanjutannya Panja tersebut tidak jelas justru semakin memperkeruh keadaan para buruh.
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memiliki data untuk Tenaga Kerja Asing sebanyak 175.000 yang ditepis oleh pemerintah hanya memiliki 85.000 Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
- Tidak adanya perlindungan hukum dan pengakuan dari pemerintah terhadap Driver Gojek dan Grab, akan tetapi kenapa perusahaan ini memiliki nilai saham yang sangat besar mencapai Rp. 38 Triliun dengan kepemilikan perusahaan asing.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa untuk menjadikan Pansus harus lebih dari 1 (satu) Fraksi minimal 2 (dua) Fraksi dan 25 (dua puluh lima) orang Anggota. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan H.R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum sudah menyiapkan TOR Pansus Angket Tenaga Kerja Asing.



- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan kesalahan dalam melihat situasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan tetapi pemerintah lebih memperkerjakan pekerja asing.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sangat mengapresiasi kepada KSPI karena kepeduliannya tentang kasus ini.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan keterkaitan GOJEK akan dibicarakan kembali dan meminta kajiannya agar bisa dianalisa untuk masuk dalam Panja.



16. Kamis, 26 April 2018, Menerima audiensi Perwakilan Ojek Online.

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Ojek Online menyampaikan :

- Perwakilan *driver online* menyampaikan merasa tertipu oleh pemerintah karena demo-demo yang telah dilakukan berujung kepada pengikaran komitmen yang dibuat oleh *driver online* dengan pemerintah. *Driver online* sekarang hanya bisa bertumpu kepada DPR RI untuk meneruskan aspirasinya.
- Belum adanya payung hukum yang memayungi hukum *Driver online* R2/Motor karena secara garis besar *driver online* merupakan masyarakat Indonesia.
- Meminta Regulasi kepada pemerintah, karena sistem aplikasi memberikan lapangan pekerjaan yang tidak terbandung tetapi pemerintah tidak mengakomodir itu.
- Adanya permainan tarif oleh perusahaan *driver online* yang merugikan mitra kerja yang seharusnya adanya kerja sama antara perusahaan dan mitra kerja dalam mengeluarkan regulasi.
- *Driver online* menginginkan dibawah oleh KOMINFO agar ada peraturan yang bisa menjadi acuan para *driver online*.

- Menuntut kenaikan tarif yang semula Rp.1.200/KM menjadi Rp.3.000-Rp.4.000/KM karena tarif sekarang sangat rendah yang memberatkan para *driver online*.
- Dalam hal ini pemerintah dimohon untuk bisa membawahi system aplikasi dari perusahaan GOJEK dan GRAB serta *driver online* tidak ingin diawasi oleh KEMENHUB karena *driver online* merupakan mitra kerja bukan buruh kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pemerintah memang harus memperjelas regulasi untuk *driver online*, pasalnya ojeg konvensional dan supir taksi menggunakan regulasi dari Kementerian Perhubungan sementara untuk *driver online* menggunakan regulasi dari aplikasi.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan untuk semuanya yang berbasis teknologi pemerintah harusnya mengakomodir karena kemajuan IPTEK. Kementerian Perhubungan yang harus mempercepat system regulasinya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan murahnya tarif per-KM/Rp.1.200 ini harusnya perusahaan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada mitra kerjanya bukan keputusan sepihak dengan *impact* yang akan terjadi seperti melakukan pekerjaan dengan terpaksa karena tidak adanya lapangan pekerjaan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan mencoba menyampaikan kembali kepada Komisi V dan Komisi I terkait kasus yang sedang terjadi yang meminta *driver online* untuk dilindungi dan diperhatikan kejelasannya.



17. Selasa, 26 April 2018, menerima audiensi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong.

Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong menyampaikan :

- Karst gombong selatan merupakan penampungan air terbesar diwilayah Gombong dan terbentuk secara alami, tetapi ada wacana pembongkaran karst gombong untuk pembangunan PT Semen Gombong.
- Warga sekaligus Pesatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong sudah melaporkan kepada Bupati, Gubernur hingga Menteri ESDM, namun oleh Menteri ESDM dilimpahkan kepada Pusat Geologi Bandung.
- Bupati menyetujui tentang pembangunan PT Semen Gombong yang menjadi pertanyaan kenapa sasaran pembangunannya yaitu Karst Gombong yang luasnya 48KM²/±700 Hektar.
- Memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk membuat Timsus supaya bisa menindaklanjuti permasalahan ini.
- Adanya ketakutan warga apabila pembangunan PT Semen Indonesia terealisasi maka akan mematikan mata air untuk 5-10 Kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa sebelumnya telah menerima surat dari Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong tentang kerusakan Karst Gombong akibat *eksplorasi* dan *eksploitasi* PT Semen Gombong.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan melakukan satu upaya pengawasan oleh Komisi terkait dan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan merekomendasikan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan membuat surat kepada Kementerian ESDM serta diteruskan ke Komisi VII untuk melakukan pengawasan selanjutnya.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sangat menyayangkan kasus ini mengingat lingkungan tersebut ada situs-situs purbakala yang harusnya dijaga.



18. Kamis, 3 Mei 2018, menerima audiensi Anggota DPRD Kendal. Serikat Petani Indonesia dan Warga Kendal Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Anggota DPRD Kendal, Serikat Petani Indonesia dan warga Kendal Jawa Tengah menyampaikan :

- Jalan tol Batang-Semarang sudah dalam proses pengerjaannya namun disayangkan DPRD Kendal tidak dilibatkan dalam proses Rapat maupun Mediasi. Warga Kendal mengeluh dengan pembangunan ini mengadu kepada DPRD Kendal. Mengenai hal ini DPRD Kendal tidak bisa menjawab soal keluhan warga dikarenakan DPRD tidak diikut sertakan dalam proses berjalannya proyek tol Batang-Semarang ini.
- Tanggal 13 April 2018 warga mendapatkan surat pengosongan oleh pihak terkait hingga pada saat 26 April 2018 sekitar 125 Bidang Tanah dan 30 Rumah yang sampai proses eksekusi sedangkan para warga belum mendapatkan uang ganti rugi sehingga para warga mengungsi di kantor DPRD Kendal.
- Pihak DPRD serta warga Kendal menyetujui dengan adanya proyek nasional ini akan tetapi warga Kendal hanya ingin meminta haknya kembali terhadap Jmasalah ganti rugi tanah.
- Warga mengklaim pihak BPN tidak mendata secara keseluruhan serta harga yang ditawarkan oleh penyelenggara pembangunan tol adalah Rp. 428.000/meter yang pada umumnya harga Rp. 800.000/meter dan Tidak sinkronnya ukuran tanah sertifikat warga dengan data BPN yang membuat warga resah, Serikat Petani Indonesia dan Warga Kendal meminta untuk memproses ulang dan menghitung bidang tanah secara bersama.
- Memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan DPRD Kendal untuk mencarikan solusi tentang permasalahan tersebut karena terkait juga dengan

aspek kemanusiaan yang awalnya mempunyai tempat tinggal menjadi tidak memiliki tempat tinggal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan keprihatinan tentang kejadian ini yang berdampak pada ekonomi maupun *psikis* anak-anak.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan menyampaikan kepada Komisi II dan Komisi V untuk memanggil BPN serta Kementerian Pekerjaan Umum.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa ini merupakan tugas DPR RI juga untuk mengawasi proses pembangunan jalan tol ini supaya bisa melihat dampak yang akan terjadi nanti maupun pengawasan sampai akhir.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan menulis surat kepada Kementerian PUPR dan BPN supaya ini menjadi perhatian mereka sesegera mungkin.



19. Selasa, 8 Mei 2018, menerima audiensi Ikatan Alumni Universitas Bung Karno.

Dalam pertemuan tersebut, Ikatan Alumni Universitas Bung Karno menyampaikan:

- Tujuan IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Universitas Bung Karno bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bermaksud menginformasikan bahwa IKA Universitas Bung Karno telah terbentuk pada bulan Desember 2017.
- IKA Universitas Bung Karno mengadakan “diskusi publik” yang bertujuan bahwa perbedaan dalam berpolitik merupakan hal wajar oleh sebab itu, kedepannya IKA Universitas Bung Karno akan mengadakan diskusi publik yang bertemakan “hutang luar negeri”.
- IKA Universitas Bung Karno Meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang menguasai dalam bidang ekonomi untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut dengan lawan debat Pemerintah Oposisi.
- Setelah Sea Games IKA Universitas Bung Karno akan mengadakan *fun walk* yang berseragam seperti Bung Karno dan ini untuk disemua kalangan terlebih masyarakat yang mengagumi Bung Karno.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mengagendakan dalam acara tersebut.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan temanya sangat penting karena utang luar negeri kita sudah begitu tinggi yang dilakukan oleh pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan dalam demokrasi kita sudah biasa dalam perbedaan dan demokrasi di Indonesia masih dalam koridornya, lain hal di Negara Amerika dan Inggris perdebatan demokrasi jauh lebih tajam dari pada Indonesia.



20. Selasa, 8 Mei 2018, menerima audiensi Pergerakan Pelaut Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Pergerakan Pelaut Indonesia menyampaikan :

- Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk segera memanggil Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Pelayaran (INSA), dan Organisasi Pelaut (PPI) guna membahas persoalan upah pelaut Indonesia yang bekerja didalam negeri, yang sampai detik ini belum memiliki standar pengupahan sektoral nasional dalam sebuah forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
- Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam segera memanggil BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (INSA), dan Organisasi Pelaut (PPI) untuk membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sangat jarang sekali pelaut menikmati program-program tersebut, karena masih banyak perusahaan-perusahaan pelayaran yang tidak menjalankan/mematuhi UU SJSN junto UU BPJS.
- Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk turut serta mengawasi pemerintah dalam penerapan/implementasi UU No.15 Tahun 2016 tentang pengesahan *Maritime Labour Convention* (MLC), 2006 yang sejauh ini belum diterapkan secara maksimal di lapangan.
- Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk turut serta mendorong pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pengerjaan di Bidang Perikanan agar pelaut perikanan Indonesia terlindungi di Luar Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mempelajari dan meneruskan aspirasi ini kepada Komisi terkait.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa memang perlunya kejelasan data untuk memverifikasi kepada Kementerian terkait kejelasan WNI yang berlayar diluar negeri supaya ketika terjadi sesuatu terhadap mereka bisa langsung diketahui oleh negara.



21. Selasa 8 Mei 2018, menerima audiensi Warga Rw 05 Sumur Batu Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Warga Sumur Batu menyampaikan :

- Bahwa persoalan kepemilikan rumah di rumah dan lahan antar warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan pihak Kodam Jaya/Jayakarta sepatutnya diuji dan diselesaikan melalui mekanisme hukum didalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 447/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.
- Bahwa pihak Kodam Jaya/Jayakarta seharusnya menghormati proses hukum perkara 447/PDT.G/2017/PN.JKT.PST hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*incracht*).
- Bahwa warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat merasa tidak nyaman dengan adanya pengakuan pihak Kodam Jaya pada tahun 2010 yang mengakui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat (objek sengketa) adalah milik Kodam aya, padahal pembangunan dan renovasi atas tempat tinggal warga tersebut dibangun sendiri oleh warga tersebut.
- Bahwa tanah warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dari bekas Eigendom Verponding No: 5039, 5749, 5752, 5670, 7734, 10152, 12218 yang terletak dikampung Sumur Batu, Kelurahan Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan menurut Kodam Jaya/Jayakarta asal

tanah tersebut adalah tanah bekas Eigendom Verponding No. 5552 sisa seluas 97.950 M2 terletak di Kampung Cempaka, Kel. Harapan Mulia.

- Bahwa warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat menerima surat dari Aslog Kodam Jaya/Jayakarta No.B/2355/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, perihal peringatan tertulis 1 yang menghimbau agar warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat untuk melakukan pengosongan rumah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan mencoba mengawasi persoalan ini melalui mekanisme pengawasan DPR RI untuk tidak memproses sebelum ada keputusan dari Pengadilan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa warga yang tinggal ditempat itu adalah penerima penghargaan Bintang Gerilya, seharusnya hal ini oleh pihak Kodam Jaya bisa dimusyawarahkan kembali dengan warga RW 05.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan akan menyurutinya dalam waktu dekat, dan kepada Komisi terkait juga akan kita sampaikan mengenai persoalan ini serta akan mencoba meninjau lokasi itu diwaktu yang tepat.



22. Selasa, 15 Mei 2018, menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia menyampaikan :

- Meminta kesejahteraan untuk Perangkat Desa dengan meminta gaji setara Gol. II.

- Peraturan Undang-undang yang belum berpihak ke Perangkat Desa salah satunya tunjangan serta Plt. Sekertariat Desa.
- Perubahan PP 43 Tahun 2014 menjadi PP 47 Tahun 2015 yang menjadikan permainan anggaran di Desa sehingga melemahnya perkembangan Desa.
- PPDR memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk mengubah peraturan bahwa Plt. SekDes haursnya mengambil dari Perangkat Desa bukan dari PNS.
- PPDR memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bahwa Perangkat Desa dijadikan Purna Bakti sesuai masa kerjanya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 dan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Desa, bahwa khususnya untuk kebutuhan yang penting segera di Transfer ke Desa oleh pihak Kabupaten supaya Perangkat Desa ini bisa menjalankan kewajibannya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan mendukung upaya status Perangkat Desa dengan Gol. II Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diharapkan mendapatkan jaminan kesejahteraan.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam penyetaraan ini Perangkat Desa paling terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan Perangkat Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Desa dirasa tidak berpihak kepada kebutuhan Perangkat Desa, karena masih melekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan penyimpangan yang terjadi di setiap desa merupakan tidak transparannya anggaran yang dikelola, perlu evaluasi yang komprehensif untuk memajukan Indonesia dari pinggir melalui desa.



23. Selasa, 15 Mei 2018, menerima audiensi Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor menyampaikan :

- Memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa menjembatani sertifikasi Surat Tanah warga Semplak Barat, Kab. Bogor.
- Penetapan guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bogor.
- Desa Cogreg, Kab. Parung merupakan penghasil ikan hias, memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa menyampaikan ke pemerintahan dalam segi pemasaran dan permodalan.
- Mewabahnya Bank Keliling/Renternir di desa-desa Kabupaten Bogor yang meresahkan lingkungan.
- Purnabakti desa, Kab. Bogor memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa memfasilitasi aspirasi warga dimasa setelah pensiun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mencoba berbicara kepada Komisi terkait untuk bisa membantu dalam sertifikasi surat tanah.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendukung dalam kejelasan status guru honorer menjadi PNS, tetapi belum siapnya pemerintah dalam pendataan dan alokasi anggaran yang menyebabkan sulitnya guru honorer menjadi PNS.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa dalam segi bantuan pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab, Wakil Ketua DPR

RI/Korpolkam akan memberikan *contact person* Anggota DPRD Provinsi agar bisa membantu dalam permasalahan ini.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Bank Keliling/Renternir merupakan organisasi yang harus berhati-hati, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam sudah menyampaikan kepada Kepala Desa Cilember dan Megamendung untuk menghimbau warganya dengan spanduk-spanduk serta penyuluhan warga .
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan apresiasi karena Purnabakti masih mau menampung aspirasi warganya dan menyampaikan kembali ke pemerintah.



24. Selasa, 15 Mei 2018, menerima audiensi Forum Alumni Mahasiswa Minangkaabau.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Alumni Mahasiswa Minang (FAMM).menyampaikan :

- Mengajak kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bergabung dalam organisasi Forum Alumni Mahasiswa Minang (FAMM).
- Meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk bisa membimbing anggota FAMM terjun dalam bidang politik maupun pemerintahan.
- Perlunya perhatian dari segi Pariwisata, Pendidikan dan Budaya Sumatera Barat

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa FAMM merupakan organisasi yang hebat serta berjiwa sosial dan jika ada kesempatan Wakil Ketua/Korpolkam akan menjadi bagian organisasi FAMM.

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada FAMM database yang dimiliki setiap daerahnya serta membangun potensi dalam berorganisasi politik dengan seminar-seminar.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan akan meneruskan masukan-masukan yang disampaikan FAMM ini kepada pihak-pihak terkait sehingga menjadi elemen yang penting dalam membangun Sumbar.



25. Rabu, 16 Mei 2018, menerima audiensi Persaudaraan Alumni 212.

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Persaudaraan Alumni 212 menyampaikan :

- Penyampaian 9 (Sembilan) agenda DPP PA 212 kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam.
- Silaturahmi dan perkenalan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212.
- DPP PA 212 mendesak DPR RI untuk segera membuat PANSUS terkait Tragedi Kerusakan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua – Depok pada tanggal 8 Mei lalu yang mengakibatkan 5 orang polisi dan 1 orang Narapidana Meninggal Dunia serta 4 Polisi lainnya luka-luka.
- DPP PA 212 meminta DPR RI untuk mendesak Pemerintah RI bersikap tegas dan keras kepada Israel dan Amerika Serikat dengan menutup kantor Dubes Amerika di Jakarta dan meminta kepada Presiden RI Bpk. Joko Widodo untuk mengumumkan bahwa Jerusalem adalah ibukota Palestina.
- DPP PA 212 meminta DPR RI untuk mengevaluasi dan mengkaji secara benar RUU dan PERPU tentang Anti Terorisme agar tidak melanggar Hak-hak Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia bila perlu membatalkan jika dianggap dapat menciptakan Disintegrasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- DPP PA 212 meminta DPR RI untuk secepatnya memanggil KAPOLRI untuk menjelaskan Aksi-aksi Terorisme yang berdampak negatif kepada Islam.

- DPP PA 212 meminta kepada DPR RI untuk mengajak Kepolisian, Masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk stop Intimidasi kepada Islam dan Umat Islam tentang massifnya penyebaran informasi negatif tentang simbol-simbol Islam seperti: Cadar, celana Cingkrang, jenggot dan lain-lain sebagainya.
- DPP PA 212 meminta DPR RI mengajak masyarakat khususnya umat Islam yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina untuk memboikot produk Israel dan Amerika Serikat.
- DPP PA 212 meminta DPR RI mendesak pemerintah RI untuk menghentikan segala bentuk Kriminalisasi Ulama dan Aktivis Islam.
- PP PA 212 mendesak kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang untuk secepatnya mendeklarasikan secara terbuka sebagai Koalisi Permanen menjelang pemilihan Presiden Tahun 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengucapkan selamat atas terbentuknya DPP PA 212.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa 9 (Sembilan) Point yang disampaikan oleh DPP PA 212 akan disampaikan kepada Fraksi-fraksi.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan seluruh elemen sangat mengecam terorisme di MAKO Brimob. Terhadap usulan tentang pembentukan Pansus akan dilimpahkan kepada Anggota-anggota DPR RI yang mempunyai cara pandang yang sama.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memyampaikan bahwa seluruh aspirasi perihal Jerussalem, Komunisme, Tenaga Kerja Asing dan Terorisme yang disampaikan oleh Tokoh-tokoh akan kita pelajari.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan catatan penting untuk kita semua bahwa jangan sampai ini menjadi Islam *Phobia* setelah ini terjadi yang berdampak saling kecurigaan terhadap umat Islam.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam UU Terorisme ini yang selalu menunda ialah Pemerintah dalam Masa Sidang Sebelumnya, akan tetapi pemerintah itu sendiri berinisiasi akan mengeluarkan Perpu terhadap kasus ini



5. Masa Persidangan V

Belum selesai masih berjalan.

Memberi Kuliah Umum, dan Menjadi Narasumber di Jakarta.

I. Masa Persidangan I

1. Jumat, 29 September 2017, menjadi Narasumber Apa Kata Hukum, Kompas TV dengan Tema “Siapa Boleh Beli senjata”



2. Senin-Selasa, 3-4 Oktober 2017, Menghadiri undangan Orasi Ilmiah dan pemberian gelar Doktor Honoris causa (Dr HC) kepada Ketua Umum DPP PKB H.Abdul Muhaimin Iskandar dari Universitas Airlangga, di Aulla Garuda Mukti, Kampus C Unair Surabaya.



II. Masa Persidangan II

-

III. Masa Persidangan III

1. Rabu, 7 Februari 2018, menjadi Nara Sumber di acara Dua Sisi TVOne, dengan tema “Kartu Kuning untuk Jokowi.”



IV. Masa Persidangan IV

- 1) **Senin, 5 Maret 2018 menjadi Nara Sumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam TVOne mengenai Muslim Cyber Army.**



- 2) **Selasa, 6 Maret 2018. Menjadi nara sumber acara :siapa dibalik MCA”.**



- 3) **Rabu, 7 Maret 2018, Menjadi Nara Sumber Talkshow Dua Sisi TVOne dengan Tema “Seputar Presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilpres”.**



- 4) **Kamis, 8 Maret 2018, menghadiri acara penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017, Pimpinan dan Anggota DPR RI.**



- 5) Kamis, 8 Maret 2018, memimpin rapat persiapan teknis dan substansi Delegasi yang akan menghadiri *The 138th Assembly of Inter Parliamentary Union (IPU) and related meetings* tanggal 24 s.d. 29 Maret 2018 di Jenewa Swiss.



- 6) **Selasa, 13 Maret 2013, Memimpin Rapat Pleno PPPFI (Filateli)**



7) Selasa, 13 Maret 2018, Memimpin Rapat Pleno DPP IKM



8) Rabu, 14 Maret 2018, menghadiri Peringatan Internanational Women's Day 2018, di Hall Gedung Nusantara DPR RI.



- 9) Senin, 2 April 2018, menghadiri undangan Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2018-2020.



- 10) Tanggal 5, 6, 7, dan 8 Mei 2018. Piket Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam (Bapak Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. dalam Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

V. Masa Persidangan V

Masih berjalan

KUNJUNGAN-KUNJUNGAN

A. Kunjungan Dalam Negeri

I. Masa Persidangan I

1. Sabtu - Minggu, 9-10 September 2017, Mengadakan kunjungan ke Padang Prov. Sumatera Barat dengan acara : “Menghadiri undangan Kampung Sakato Visual Art Society dalam acara Pameran Senirupa yang bertajuk Tambo 2 SANDI 2017 di Galeri Taman Budaya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
2. Rabu, 13 September 2017, Mengadakan Kunjungan lapangan ke Kampung Bayam Jakarta Utara, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dalam rangka meninjau Gusuran yang didampingi oleh Bapak H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si dan Bapak Ario PS. Djojohadikusumo.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam merasa kaget mendengar bahwa ada 535 kepala keluarga berada dalam kondisi yang harus dipindahkan, dan rencananya akan dibangun stadion.
- Sangat mendukung dan setuju dengan pembangunan dan setuju dengan penataan, tetapi penataan harus berkeadilan tidak boleh ada yang dirugikan termasuk warga masyarakat.
- Berbicara masalah Rohingya yang jauh, disini sudah diperjuangkan dan meminta kepada Gubernur yang menjabat (Bapak Djarot) untuk menunda rencana pengusuran atau apapun, dan lebih baik menyerahkan hal ini kepada Gubernur baru yang 1 (satu) bulan lagi dilantik dan akan menyampaikan aspirasi ini dan tentu juga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- Menghimbau kepada Gubernur sekarang yang sebentar lagi akan lengser tinggal menghitung hari. Diharapkan Gubernur Djarot tidak mengambil tindakan-tindakan yang drastis lebih bagus mempersiapkan proses transisi kepada Gubernur yang baru, dan biarkan Gubernur yang baru ikut menata di Kampung Bayam ini.



II. Masa Persidangan II

1. Rabu, 29 November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Indonesia, di Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution No.113, Sago, Senapelan, Swampang Tiga, Bukit Raya , Kota Pekanbaru, Riau.

2. Rabu, 29 November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri Festival Budaya Minangkabau di Batu Sangkar dan Istana Basa Pagaruyung.
3. Senin, 4 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan Ceramah Mahasiswa STIAMI di Gedung Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI.
4. Jumat, 8 Desember 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengadakan Kunjungan ke Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan. (UIN Syarif Hidayatullah). Bersamaan Biem Benyamin dan Sufmi Dasco Ahmad.

III. Masa Persidangan III

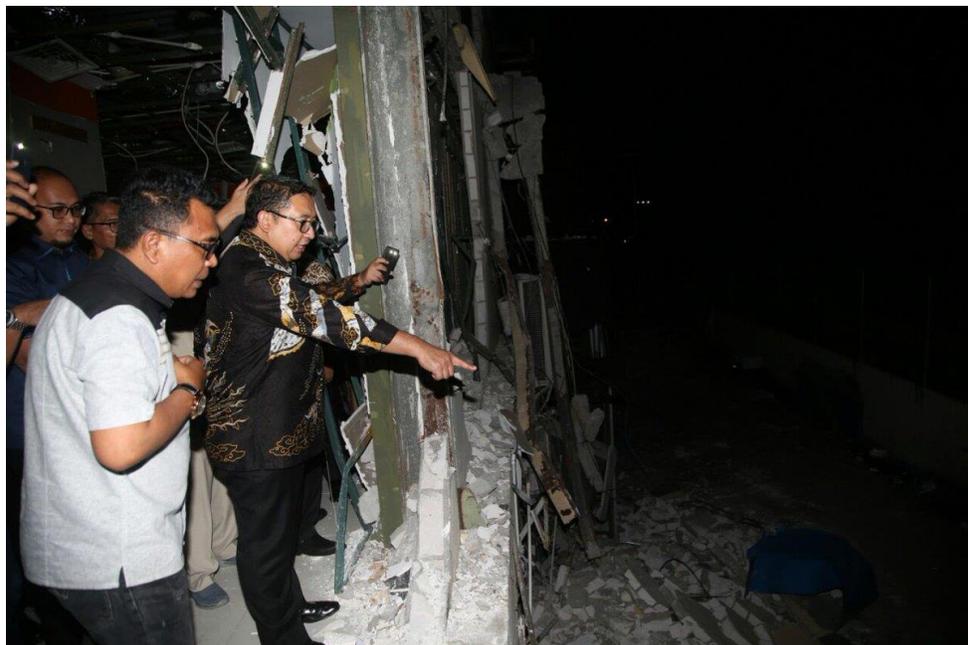
1. Selasa, 9 Januari 2018, menghadiri undangan Sidang Akademik Universitas Indoneaia Depok Provinsi Jawa Barat, Promosi Doktor Sdr. Romita Rustam dalam Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Stratejik.



2. Senin s.d. Rabu, 15 s.d. 17 Januari 2018, meninjau lokasi bencana longsor ke Cisarua Bogor Jawa Barat.



3. Kamis dan Jumat , 1 dan 2 Februari 2018 mengadakan sidak ke lokasi Basko Grand Mall yang menjadi lahan sengketa antara PT Kereta Api dengan PT Basko Minang Plaza (Basko Grup) Padang Provinsi Sumatera Barat.



4. Sabtu s.d. Minggu, 10 s.d 11 Februari 2018, sebagai narasumber Mata Najwa Kota Malang Provinsi Jawa Timur.



IV. Masa Persidangan IV

1. Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 16 Maret 2018 memimpin Kunjungan Kerja Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan D.I. Yogyakarta ke Timika Provinsi Papua.



Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Papua



Kunjungan Lapangan di PT. Freeport Papua.

2. **Jumat s.d. Sabtu, 30 s.d. 31 Maret 2018, mengadakan Kunjungan ke Singaraja (Kabupaten Buleleng) Provinsi Bali dalam rangka menghadiri undangan Kerajaan Buleleng.**



3. Minggu, 1 April 2018, Mengadakan Kunjungan ke Depok Provinsi Jawa Barat dalam rangka bertemu dengan Alim Ulama dan Tokoh-tokoh masyarakat.



4. Rabu, 4 April 2018, Mengadakan Kunjungan ke Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia, di Depok Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadiri undangan Peluncuran dan diskusi Buku dengan tema “Sejarah Buton yang terabaikan: Labu Rope labu Wana”.



5. Rabu, 11 April 2018, mengadakan Kunjungan Kerja ke Hambalang Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam rangka bertemu Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat di Hambalang.



6. Kamis-Jumat, 12-13 April 2018, mengadakan Kunjungan ke Bali dalam rangka pertemuan dengan Alim Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Ubud Kabupaten Gianyar, Bali dan menghadiri undangan di Ubud Bali



7. **Jumat, 20 April 2018, mengadakan Kunjungan Kerja ke Medan Provinsi Sumatera Utara** dalam rangka memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sumatera Utara dengan Tema “**Peran Pemuda dalam Membangun Indonesia Raya**”.



8. **Minggu s.d. Senin, 15 s.d. 16 April 2018, mengadakan Kunjungan ke Semarang dan Solo, Provinsi Jawa Tengah.**



Susunan Delegasi Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Armenia adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1) Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. | F-P.Gerindra/ A-347 | Ketua Delegasi |
| 2) Jimmy Demianus Ijie | F-PDIP/A232 | Anggota |
| 3) Ir. H. Bambang Haryo Soekartono | F-P. Gerindra/A364 | Anggota |
| 4) Fadhlullah | F-P. Gerindra/A-324 | Anggota |
| 5) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE | F-PKS/A-119 | Anggota |
| 6) Dra. Ermalena MHS | F-PPP/A-536 | Anggota |

Delegasi Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didampingi Kasubag TU Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Adc Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Pemred TVR Parlemen, Penasehat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan Wartawan Detik.Com.

Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didampingi juga oleh Duta Besar Armenia untuk Indonesia, H.E. Anna Aghadjanian dan Konsul Kehormatan Armenia (Yervand Voskanyan)

Maksud dan tujuan Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Armenia adalah dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Armenia secara umum, DPR RI dan Parlemen Armenia secara khusus dengan Agenda penguatan kerja sama yang mencakup bidang kerja sama parlemen, diplomasi, dan tata pemerintahan.

3. Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Armenia(*National Assembly Armenia*)

- a. Pada Pertemuan Delegasi RI dengan Parlemen Armenia dihadiri oleh Wakil Ketua Parlemen Armenia, Mikayel Melkumyan, dan anggota parlemen dari berbagai fraksi dan komisi.
- b. Dalam pertemuan, kedua belah pihak menjelaskan mengenai struktur parlemen masing-masing dan kemungkinan pengembangan kerja sama di berbagai bidang, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada, peningkatan kerja sama antar parlemen.
- c. Parlemen Armenia menyampaikan bahwa terdapat penurunan ekspor Armenia secara keseluruhan dan dengan demikian, di masa mendatang, Armenia berencana untuk meningkatkan sektor pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Untuk mendukung hal tersebut, Parlemen Armenia menyampaikan harapannya mengenai pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yerevan.
- d. Parlemen Armenia juga memberikan perspektifnya mengenai konflik Nagorno-Karabakh (NK). Disampaikan bahwa fokus Armenia adalah untuk mencapai solusi damai dalam permasalahan NK. Armenia tidak menginginkan konflik NK untuk berkembang / dipandang sebagai konflik agama dan Armenia berusaha untuk melindungi kepentingannya di NK (masyarakat etnis Armenia dan peninggalan budaya / sejarah).
- e. Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Armenia, terutama dalam hal pariwisata, di mana Indonesia memiliki populasi besar

yang cukup sering bepergian ke seluruh dunia. Dalam hal ini, kedua belah pihak berharap bahwa akan terdapat penerbangan langsung antara Yerevan-Jakarta di masa mendatang.

- f. Disampaikan juga bahwa hubungan antara Indonesia dan Armenia memiliki sejarah yang cukup panjang, sebagai contoh, arsitek yang merancang Kebun Binatang Ragunan di Indonesia berasal dari Armenia.
- g. Wakil Ketua Parlemen Armenia, Melkumyan menyampaikan bahwa pihaknya percaya bahwa kedua negara dapat meningkatkan kerja sama melalui peningkatan kontak dengan satu sama lain, termasuk dengan saling kunjung. Melkumyan menyayankan kecilnya perdagangan antara kedua negara. Dalam hal ini, disampaikan bahwa blokade oleh Turki mempengaruhi volume perdagangan internasional Armenia. Walaupun demikian, Armenia memiliki perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa untuk mendukung perkembangannya.
- h. Kedua belah pihak juga menjajaki kemungkinan kerja sama dalam bidang energi. Armenia sedang mengembangkan sumber energi alternatif, termasuk matahari, angin, dan nuklir.



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Mr. Mikayel Melkumyan, Wakil Ketua Parlemen/*National Assembly* Armenia)



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Mr. Mikayel Melkumyan, Wakil Ketua Parlemen/*National Assembly* Armenia)

4. Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Armenia, Armen Papikyan

- a. Dr. Fadli Zon menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Armenia sebenarnya punya potensi untuk ditingkatkan. Indonesia juga merupakan pasar besar yang terbuka terhadap investasi Armenia, Indonesia juga tergabung dalam negara-negara G20. Dr. Fadli juga meminta agar ada kebijakan bebas visa untuk warga Indonesia yang berkunjung ke Armenia, karena Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan bebas visa bagi pemegang Paspor Armenia untuk kunjungan sampai dengan 30 hari semenjak bulan Maret 2016.
- b. Papikyan merespons, Kementeriannya mendorong peningkatan hubungan dengan Indonesia. Papikyan juga kembali menegaskan dukungan Armenia atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Armenia, Armen Papikyan)



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Armenia, Armen Papikyan)

5. Pertemuan dengan Menteri Pertanian Armenia, Ignaty Arakelyan

Menteri Pertanian Armenia, Ignaty Arakelyan menyampaikan bahwa sama seperti Indonesia, Armenia juga merupakan negara agraris dengan komoditas ekspor pertanian utama berupa sayuran segar, kentang dan daging dan negara tujuan ekspor utama seperti Georgia dan Iraq.

- a. Pemerintah Armenia memberikan subsidi untuk modernisasi teknologi pertanian untuk para petani kecil, seperti untuk pembuatan anggur serta pengemasan sayur dan selai serta dalam teknologi panen dan penyimpanan.

- b. Impor produk pertanian utama Armenia meliputi biji-bijian, gula, daging ayam, daging babi, dan buah-buahan tropis. Menteri Arakelyan menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang pertanian.
- c. Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa perlu diadakan forum bisnis antara pengusaha pertanian Indonesia dan Armenia yang akan difasilitasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Republik Armenia di Kyiv.
- d. Kedua pihak berdiskusi mengenai tantangan dalam perkembangan pertanian di kedua negara, terutama terkait dengan kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas pertanian.
- e. Menteri Arakelyan menyampaikan bahwa masyarakat, termasuk generasi muda, akan tertarik pada kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Dengan demikian, Pemerintah perlu mendukung peningkatan nilai produk pertanian. Karena permintaan akan produk organik meningkat, maka Armenia saat ini memiliki fokus untuk meningkatkan pertanian organik. Hal ini juga penting karena Armenia merupakan negara yang kecil, akan tetapi memiliki tanah yang subur.



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Menteri Pertanian Armenia, Ignaty Arakelyan)

- 6. **Makan Malam dengan Mr. Mikayel Melkumyan, Wakil Ketua Parlemen/*National Assembly* Armenia**



(Dinner Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Mr. Mikayel Melkumyan, Wakil Ketua Parlemen/*National Assembly* Armenia)

7. Pertemuan dengan Wakil Menteri Hukum Armenia, Mr. Vigen Kocharyan

- a. Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia ingin mempelajari kebijakan pemberantasan korupsi Armenia.
- b. Wakil Menteri Hukum Armenia menjelaskan bahwa Armenia memiliki Komisi Anti Korupsi dan sistem hukum untuk pencegahan dan penindakan korupsi. Kementerian Hukum membuat undang-undang anti korupsi bersama dengan legislator.
- c. Selain itu, Kementerian Hukum juga melakukan kerja sama internasional untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman negara lain untuk melakukan perbaikan dan *institutional reform*.



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Wakil Menteri Hukum Armenia, Vigen Kocharyan)



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Wakil Menteri Hukum Armenia, Vigen Kocharyan)



(Pertemuan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan dengan Wakil Menteri Hukum Armenia, Vigen Kocharyan)

8. Kunjungan ke TUMO Center for Creative Technologies

- a. Delegasi RI ditemui oleh Marie Lou Papazian, Direktur TUMO Center for Creative Technologies yang merupakan organisasi independen. Dijelaskan bahwa pusat tersebut menyediakan pendidikan tambahan selama dua jam pada sore hari secara cuma-cuma untuk remaja (usia 12-18 tahun) mengenai keterampilan, IT, teknologi, dan musik. Sejumlah pelajar TUMO memenangkan kompetisi teknologi internasional.
- b. Pusat TUMO menyediakan *personal learning plan* disesuaikan dengan minat masing-masing pelajar. Para pelajar memiliki kebebasan untuk mengikuti kelas apapun yang mereka inginkan dan seluruh peralatan penunjang disediakan di kelas. Pusat TUMO sudah beroperasi selama 6 tahun dan sudah melatih sekitar 8 ribu pemuda Armenia.
- c. Wakil Ketua DPR menyampaikan bahwa Pusat TUMO dapat menjadi inspirasi untuk Indonesia untuk menyediakan pusat pelatihan serupa.



(Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc berkunjung ke TUMO Center for Creative Technologies, yaitu pusat pembelajaran media digital gratis di Yerevan, Armenia)

9. Selasa s.d. Jumat, 5 s.d. 8 September 2017, Memimpin Delegasi DPR RI dalam rangka Sidang World Parliamentary Forum On Sustainable Development di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC)
10. Kamis s.d. Rabu, 14 s.d. 20 September 2017 Memimpin Delegasi DPR RI ke Sidang AIPA di Manila – Filipina.
11. Kamis s.d. Selasa, 12 s.d. 17 Oktober 2017, Memimpin Delegasi Indonesia ke Sidang The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) ke Rusia.
12. Minggu s.d. Jumat, 5 s.d. 10 November 2017, Menghadiri Undangan UNODC kepada GOPAC (Seventh Forum of Parliamentarians in Viena, Austria).

II. Masa Persidangan II

1. Sabtu s.d. Jumat, 11 s.d. 17 November 2017, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Kunjungan Muhibah ke Negara Ukraina.

- Susunan Delegasi Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Ukraina adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. | Ketua Delegasi/Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam/FPGerindra |
| 2. | H. Nurzahedi, S.E. | Anggota Delegasi/ FPGerindra/ Anggota Komisi VI DPR RI |
| 3. | H. M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. | Anggota Delegasi/ F.PKS/ Anggota Komisi III DPR RI |
| 4. | Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si. | Anggota Delegasi/ F.PPP/ Anggota Komisi IX DPR RI |

- Selama kunjungan, delegasi DPR RI melakukan pertemuan/kunjungan dengan beberapa instansi/lembaga negara, yaitu:

Pertemuan dengan Duta Besar LB dan BP Republik Indonesia untuk Ukraina (Prof.DR.H.Yuddy Chrisnandi, ME)



Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Ukraina (Iryna Herashchenko) dengan pokok pembicaraan sebagai berikut:

- Wakil Ketua Parlemen Ukraina menyampaikan selamat datang kembali kepada Wakil Ketua DPR RI dan menyatakan bahwa kunjungan ini menandakan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Ukraina terus meningkat pada perayaan 25 tahun hubungan diplomatic kedua Negara tahun ini. Herashchenko mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan Indonesia terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Herashchenko menyampaikan bahwa pada saat ini prioritas kebijakan luar negeri Ukraina adalah untuk meningkatkan tekanan secara politis dan diplomatis terhadap Moskow untuk mengembalikan daerah okupasinya kepada Ukraina. Untuk mendukung tujuan tersebut, Ukraina juga melakukan reformasi di tubuh angkatan bersenjata.



- Herashchenko juga menyampaikan data korban jiwa dan luka-luka di wilayah konflik Donbas (Ukraina Timur) dan juga Krimea yang diokupasi oleh Rusia. Disampaikan bahwa saat ini, di Donbas juga terdapat kehadiran militer Rusia dengan jumlah personil kurang lebih 36.000 orang.
- Sebagai Negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Herashchenko percaya bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam pendekatan kolektif secara Internasional terhadap Rusia mengenai konflik di Ukraina timur dan okupasi Krimea. Dalam hal ini, Herashchenko juga berharap agar Indonesia dapat mendukung resolusi MU PBB mengenai kondisi HAM di Krimea dan Sevastopol yang juga mempengaruhi Etnis Tatar Krimea yang beragama muslim.
- Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa secara prinsipil Indonesia akan terus mendukung integritas wilayah Ukraina dan bahwa kunjungan sejumlah kunjungan DPR RI ke Ukraina pada tahun ini, termasuk Kunjungan Muhibah merupakan bukti dari keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen dengan Ukraina.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan harapannya agar parlemen kedua Negara dapat meningkatkan dukungan untuk kerja sama ekonomi kedua Negara. Dalam hal ini sektor pariwisata merupakan wilayah kerja sama yang sangat potensial. Banyak turis Indonesia yang memiliki keinginan untuk mengunjungi Ukraina dan dapat membantu pertumbuhan industry pariwisata Ukraina, akan tetapi terkendala oleh prosedur visa. Dengan demikian Pemerintah Indonesia akan sangat menghargai bila Pemerintah Ukraina dapat memberikan kebijakan bebas visa untuk WNI secara resiprokal karena Indonesia juga telah membebaskan visa untuk kunjungan singkat Warga Negara Ukraina ke Indonesia.

Pertemuan dengan Wakil Menteri Kebijakan Agrarian dan Pangan Ukraina (Viktor Sheremeta). Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal sebagai berikut:

- Wakil Menteri Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina menyampaikan bahwa pada saat ini Ukraina sudah melakukan ekspor gandum ke Indonesia dan berharap juga dapat menambah komoditas pertanian dan meningkatkan eksportnya ke Indonesia mencakup produk buah-buahan dan susu. Disampaikan bahwa Genetically Modified Organisms (GMO) dilarang oleh hukum Ukraina, dengan demikian seluruh produk pertanian Ukraina bebas dari GMO. Selain itu, banyak produk pertanian Ukraina adalah organik dan tidak menggunakan pupuk kimia maupun pestisida.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan ekspor CPO nya ke Ukraina dan menjajaki kemungkinan kerjasama dalam bidang teknologi pertanian. Selain itu, sebagai Ketua HKTI Dr. H. Fadli Zon, S.S.M.Sc. juga menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan antara asosiasi petani dari kedua Negara, selain juga untuk meningkatkan hubungan bisnis antara pengusaha pertanian Indonesia dan Ukraina. Diharapkan bahwa Forum Kerjasama Bilateral Indonesia-Ukraina mendatang dapat mempertemukan wakil-wakil dari pengusaha pertanian Indonesia dan Ukraina.



Kunjungan ke Universitas Taras Shevchenko, Ukraina. Dalam Kunjungan tersebut didiskusikan hal-hal sebagai berikut:

- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didampingi Duta Besar RI untuk Ukraina serta Dr. Prabowo Himawan sebagai staf pengajar Pusat Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia, berdiskusi dengan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Taras Shevchenko. Sebagian besar mahasiswa menerima beasiswa darmasiswa untuk studi di Indonesia selama satu semester. Mereka cukup fasih berbahasa Indonesia.
- Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendorong para alumni Darmasiswa [Ukraina](#)-Indonesia untuk mempererat persaudaraan melalui forum alumni Darmasiswa. Dengan dilembagakan, maka forum alumni

akan semakin kuat dan menjadi duta Indonesia di [Ukraina](#) yang akan mempromosikan Indonesia kepada masyarakat [Ukraina](#).

- Forum alumni darmasiswa dapat berperan lebih aktif lagi dalam mendukung program-program yang diselenggarakan oleh KBRI [Ukraina](#).
- Dalam kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa Darmasiswa mengungkapkan permohonannya agar dapat memperoleh bantuan buku-buku tentang Indonesia.
- Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan mengirim buku-buku sastra dan budaya Indonesia untuk program studi bahasa dan sastra Indonesia, sertakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kementerian Pendidikan di Indonesia. Agar semakin banyak referensi buku Indonesia di pusat kajian Bahasa dan sastra Indonesia.



Pertemuan dengan Organisasi Muslim Ukraina. Dalam pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Delegasi diterima secara terpisah oleh Pimpinan (Mufti) dari dua organisasi muslim Ukraina, The Religious Administration of Ukrainian Muslim dan Al Raid: All-Ukrainian Association of Social Organisations.
- Mufti Ukraina, Dr. Sheikh Akhmed Tamim, Kepala The Religious Administration of Ukrainian Muslim juga saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi seluruh organisasi keagamaan Ukraina, All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations.
- Dalam kedua pertemuan tersebut, para Pimpinan Asosiasi Muslim Ukraina sangat menghargai kunjungan berbagai pejabat pemerintahan dari Indonesia, sebagai Negara muslim terbesar di dunia, ke Asosiasi Muslim Ukraina yang menunjukkan hubungan persaudaraan kedua Negara dalam tataran formal maupun masyarakat.
- Seluruh pihak sepakat untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mempromosikan citra Islam sebagai agama yang damai. Kedua organisasi muslim Ukraina juga menyampaikan keinginannya untuk berpartisipasi dalam

konferensi atau kegiatan terkait yang diselenggarakan oleh asosiasi Muslim di Indonesia.

- Selain itu, khusus Mufti Ukraina, Dr. Sheikh Akhmed Tamim, menyampaikan permohonan jika Indonesia dapat membantu upaya diplomasi untuk pembebasan beberapa Etnis Tatar Krimea yang menjadi tahanan politik oleh otoritas pendudukan Rusia di Krimea.



2. Sabtu s.d. Jumat, 18 s.d. 24 November 2017, Mengadakan Kunjungan Muhibah Pimpinan DPR RI Ke Negara Polandia.

- Susunan Delegasi Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Georgia adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. | Ketua Delegasi/Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam /FPGerindra |
| 2. | Ir. Ahmad Riza Patria, MBA | Anggota Delegasi/ FPGerindra/
Anggota Komisi II DPR RI |
| 3. | Anang Hermansyah | Anggota Delegasi/ FPPAN/ Anggota
Komisi X DPR RI |

- Selama kunjungan, delegasi DPR RI melakukan pertemuan/kunjungan dengan beberapa instansi/lembaga negara, yaitu:

Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Polandia (Mr. Peter F. Gontha). Dalam Pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam diminta untuk melobi Senat Polandia demi meningkatkan akses Indonesia ke Uni Eropa.
- Diharapkan DPR RI agar dapat menyampaikan beberapa peluang kerjasama yang perlu diperkuat antara Indonesia-Polandia terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Juga beberapa tantangan yg dihadapi oleh Indonesia dan Polandia dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral.
- Pentingnya perkuat kerjasama bilateral Indonesia-Polandia untuk mendapat dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan akses pasar UE yang lebih luas. Delegasi DPR RI akan melobi Senat untuk mendorong pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan *code sharing* untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta.



Pertemuan dengan Ketua Senat Warsaw Polandia, (Mr. Stanislaw Karczewski). Dalam pertemuan tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pertemuan terbatas dengan Ketua Senat Polandia HE. Mr. Stanislaw Karczewski di Ruang Senat, Warsawa Polandia. Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kerja DPR RI untuk menguatkan diplomasi bilateral,

Indonesia-Polandia khususnya bidang pertanian, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

- Disampaikan beberapa peluang kerjasama antara Indonesia-Polandia terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Polandia dalam menguatkan hubungan kerjasama bilateral. Pada pertemuan tersebut, Dr. Fadli Zon meminta dukungan Polandia terhadap produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan akses pasar UE yang lebih luas. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI melobi senat Polandia untuk membuka jalur penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan *code sharing* untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta.



Pertemuan dengan Menteri Pertanian Polandia, (Mr. Krzysztof Jurgiel). Dalam pertemuan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pertemuan tersebut untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi pemerintah Polandia dalam meningkatkan sektor pertanian. Selain itu, pada pertemuan tersebut juga menjadi untuk mendiskusikan beberapa peluang-peluang yang mungkin terjalin dalam merealisasikan MoU pertanian yang sudah terbentuk. Mr.Jurgiel selaku menteri pertanian Polandia, menyampaikan pentingnya membuka akses pasar Polandia di Indonesia. Keterbukaan pasar Indonesia menjadi kunci dalam menjalin hubungan kerjasama Indonesia-Polandia. Selain itu Polandia juga menawarkan alat mesin pertanian yang berkualitas dan terbuka untuk dilakukan *join investment*.
- Delegasi dari Indonesia menyambut baik penawaran yang disampaikan Menteri Pertanian Polandia untuk membuka pasar ke Indonesia, salah satunya ekspor daging sapi ke Indonesia. Yang terpenting daging impor tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu dagingnya halal, bebas dari penyakit kuku dan mulut, juga harganya bisa bersaing.

- Wakil Ketua DPR RI menilai bahwa harga daging sapi di Polandia masih tergolong murah dengan harga daging sekitar 2 sampai 3 dolar AS per kilogram. Menurutnya, harga daging sapi tersebut sangat murah dan masuk akal daripada membeli daging sapi dari Australia atau Selandia Baru, yang mahal.
- Selain membicarakan beberapa peluang kerjasama di bidang pertanian, pertemuan tersebut juga membahas nilai perdagangan Indonesia-Polandia. Sejauh ini, nilai perdagangan Indonesia-Polandia berkembang baik. Pada 2016, total nilai perdagangan kedua negara sebesar 513,11 juta dolar AS, meningkat 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan surplus Indonesia sebesar 226,93 juta dolar. Sementara 2015, nilai perdagangan bilateral tercatat sebesar 509,26 juta dolar, dengan surplus di pihak Indonesia senilai 208,51 juta dolar. Hal ini untuk mengoptimalkan kerja sama antara Indonesia dengan Polandia, khususnya di bidang pertanian.

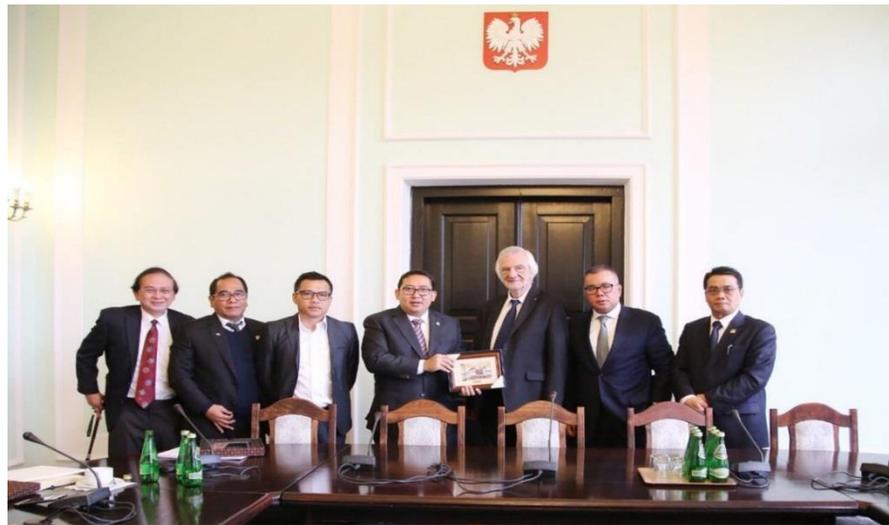


Pertemuan dengan Wakil Ketua SEJM Polandia, (Mr. Ryszard Terlecki, PiS). Dalam pertemuan tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kerja DPR RI untuk menguatkan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia khususnya bidang pertanian, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Pertemuan tersebut sebagai upaya mengenai penguatan diplomasi bilateral Indonesia-Polandia, salah satunya adalah komitmen kedua negara untuk terus membantu menuntaskan krisis yang dialami warga etnis Rohingya di Myanmar dan berkomitmen melawan segala bentuk terorisme.
- Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR beserta delegasi dari Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang mengusulkan Resolusi terhadap kasus Rohingya di Myanmar di sidang IPU kemarin. Fadli Zon juga menyampaikan ucapan terimakasih atas sikap parlemen Uni-Eropa yg

mendukung keputusan IPU terkait Resolusi Konflik Rohingya, Myanmar. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia dan Polandia sama-sama memiliki komitmen kuat dalam melawan segala bentuk terorisme dan menghargai kebebasan HAM.

- Pembicaraan lainnya yaitu harapan Indonesia untuk mendapatkan dukungan yang lebih aktif lagi dari Polandia terutama dalam kerjasama di forum forum internasional, salah satunya dukungan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020 2022. Delegasi DPR RI juga menyampaikan bahwa sejauh ini, Pemerintah RI dan Polandia telah menandatangani Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan dan Pendidikan saat kunjungan Presiden RI ke Polandia pada bulan April 2003. Pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI September 2013, telah ditandatangani juga Surat Pernyataan Kehendak (LoI) di bidang pendidikan tinggi, peningkatan kapasitas, kerja sama antar universitas dan pertukaran mahasiswa. Sebagai tindak lanjut penandatanganan LoI tersebut, saat ini tengah disusun MoU Kerja Sama Pendidikan Tinggi RI-Polandia.
- MoU ini adalah peluang yang cukup efektif untuk membuka peluang pertukaran pelajar, dosen dan *joint research*. Fadli Zon juga menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan *people to people contacts*, sejak 1987-2015, Pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 395 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Indonesia- Polandia meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, yakni dengan melakukan pertukaran pelajar dan pengajar, serta melakukan penelitian ilmiah.



Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Polandia (H.E. Mrs Joanna Wroniecka). Dalam pertemuan tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pertemuan tersebut, DPR RI berharap dukungan dari Menlu Polandia untuk memberikan fasilitas bebas visa Schengen kepada masyarakat Indonesia yang hendak mengunjungi Polandia. Fadli Zon menyampaikan bahwa fasilitas bebas visa dari Polandia untuk masyarakat Indonesia akan membawa efek positif bagi kerja sama kedua negara. Visa memang berkaitan erat dengan keamanan terutama seiring meningkatnya ancaman terorisme. Namun, Fadli Zon juga mengingatkan pentingnya bebas visa untuk mendongkrak kegiatan perekonomian.
- Dengan pemberian bebas visa tentu saja akan mendorong investasi dan pariwisata. Juga akan meningkatkan *people to people contacts*. Lebih lanjut, pertemuan tersebut membicarakan beberapa program kerjasama terutama bidang pendidikan yang selama ini sudah dilakukan Indonesia-Polandia. Indonesia selama kurun waktu 1987-2015 telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada 395 mahasiswa Polandia. Beasiswa itu diperuntukkan bagi mahasiswa Polandia yang belajar seni dan budaya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan pada tahun ajaran 2015/2016, ada 36 pelajar Polandia yang menerima beasiswa Darmasiswa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI).



Pertemuan dengan Kepala Kabinet Presiden Polandia, (Mr. Krzysztof Szczerski). Dalam pertemuan tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah Polandia menunjukkan komitmennya untuk mendukung kesatuan wilayah Republik Indonesia. Polandia yang saat ini memiliki posisi penting di Uni Eropa juga mengharapkan Indonesia bisa segera mengatasi persoalan keamanan, termasuk gangguan gerakan separatis di Papua. Salah satu yang di bicarakan pada kunjungan kerja ke Polandia adalah meminta dukungan Polandia terhadap integritas wilayah Indonesia. Polandia sebagai negara yang aktif dalam forum-forum internasional di kawasan Uni-Eropa, mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua



- Kepala Kabinet Presiden Polandia, Mr. Szczerki mengharapkan Indonesia bisa benar-benar aman dan kondusif. Szczerki juga mengharapkan pemerintah Indonesia bisa segera menyelesaikan persoalan Papua. Keamanan menjadi faktor penting. Terjaganya stabilitas keamanan di Indonesia akan berpengaruh pada para investor yang berminat untuk menanamkan modal khususnya dari pihak Polandia.
- Menurut Fadli Zon, gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional. Karena itu, Fadli Zon mengapresiasi sikap Polandia yang mendukung penuh integritas wilayah NKRI. Menurutnya, dukungan Polandia menjadi modal penting bagi RI untuk menjelaskan persoalan Papua ke Uni Eropa.

1. Senin s.d. Jumat, 18 s.d. 22 Desember 2017, mengadakan Kunjungan Muhibah Pimpinan DPR RI ke Negara Bangladesh.

- Susunan Delegasi Kegiatan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Bangladesh adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. 2. Nurmansyah E. Tanjung, S.E. | <p>Ketua Delegasi/Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam/FPGerindra
Anggota Delegasi/ FPDIP/ Anggota Komisi IX DPR RI</p> |
|--|---|

3. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si.,
M.Psi.T.

Anggota Delegasi/ F.PKS/ Anggota
Komisi X DPR RI

- Selama kunjungan, delegasi DPR RI melakukan pertemuan/kunjungan dengan beberapa instansi/lembaga negara, yaitu:

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh (Dr. Shirin Sharmin Chaudhury).
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan:

- Ucapan selamat Victory Day tanggal 16 Desember 2017 yang merupakan hari bersejarah yang sangat penting bagi Bangladesh.
- Simpati yang mendalam atas masalah pengungsi Rohingya yang telah menjadi bahan yang cukup berat bagi Bangladesh.
- DPR RI turut mencari solusi atas krisis pengungsi Rohingya melalui partisipasi aktif dan usulan resolusi mengenai isu Rohingya, khususnya di IPU Assembly ke-137 di Saint Petersburg dan di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada September 2017 lalu di Manila, yang untuk pertama kalinya tidak menghasilkan resolusi yang bersifat politis karena terdapat penolakan terhadap resolusi mengenai Rohingya usulan Indonesia.
- Indonesia telah memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya berupa 74 ton barang bantuan kemanusiaan dari Pemerintah dan bantuan dari masyarakat Indonesia melalui LSM-LSM yang tergabung dalam *Indonesia Humanitarian Alliance* (IHA) dan LSM Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang hingga saat ini masih melakukan aktivitas kemanusiaan di berbagai wilayah pengungsian Rohingya di Cox's Bazar.
- Pemerintah Bangladesh diharapkan dapat memberikan visa multiple dengan masa tinggal 3 bulan untuk para relawan IHA yang saat ini hanya memperoleh visa Single Entry 14 hari. Masa tinggal yang lebih lama diperlukan, agar para relawan IHA dapat melaksanakan tugas kemanusiaan di wilayah pengungsi di Cox's Bazar dengan lebih optimal.

- Saran agar Ketua Parlemen Bangladesh menulis surat kepada Ketua-Ketua Parlemen Negara-negara anggota ASEAN guna meminta dukungan politis bagi penyelesaian krisis Rohingya di Bangladesh.



Ketua Parlemen Bangladesh dalam tanggapannya menyampaikan sebagai berikut:

- Terima kasih atas bantuan dan dukungan Pemerintah, Parlemen/DPR RI dan Rakyat Indonesia terhadap krisis Rohingya di Bangladesh.
- Menyambut baik kunjungan delegasi DPR RI ke Cox's Bazar, agar dapat melihat langsung kondisi pengungsian Rohingya di Bangladesh.
- Menekankan perlunya dukungan politik dari Indonesia dan dunia internasional dalam penyelesaian isu Rohingya.
- Repatriasi merupakan solusi terbaik bagi krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh.
- Menyambut baik saran Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk menulis surat yang ditujukan kepada Ketua-Ketua Parlemen Negara anggota ASEAN untuk meminta dukungan politik guna penyelesaian krisis isu Rohingya.

Pertemuan dengan *State Minister of Foreign Affairs* Kementerian Luar Negeri Bangladesh (Mr. Shahriar Alam MP). Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal sebagai berikut:

- Penghargaan dan terima kasih atas peran aktif Menlu RI yang telah mengambil langkah/upaya dalam membantu Bangladesh untuk menyelesaikan krisis Rohingya, baik secara bilateral dengan Bangladesh dan Myanmar, dan di berbagai forum regional dan multilateral.

- Telah disepakati perjanjian bilateral antara Bangladesh-Myanmar mengenai pelaksanaan repatriasi bagi pengungsi Rohingya pada tanggal 23 November 2017 di Myanmar, Joint Working Group (JWG) Bangladesh-Myanmar juga telah disepakati pada hari pertemuan tersebut (19 Desember 2017). Namun pelaksanaan kesepakatan repatriasi diperkirakan tidak akan mudah, mengingat banyak pengungsi Rohingya tidak memiliki dokumen identitas karena rumah-rumah mereka di Rakhine telah dibumi hanguskan. Selain itu, perlu dipersiapkan infrastruktur yang memadai di Rakhine, jaminan keamanan dan keselamatan, dan secara sukarela. Namun demikian, hal yang membesarkan hati adalah hasil survey salah satu media di Bangladesh menyebutkan bahwa sebanyak 78% Rohingya ingin kembali ke Rakhine, dan hanya sedikit yang ingin menetap di Bangladesh.



- Arus pengungsi Rohingya di Bangladesh telah terjadi sejak tahun 1970an, dan telah terdapat tiga kali perjanjian bilateral mengenai repatriasi pengungsi yakni pada tahun 1978, 1992, dan 2017. Dalam dua kali perjanjian terdahulu, pihak Myanmar dinilai tidak kooperatif.
- Indonesia, sebagai Negara sahabat dan Negara anggota ASEAN yang berpengaruh diharapkan dapat mendekati dan mempengaruhi pihak RRT agar mendukung penyelesaian isu Rohingya secara bilateral antara Bangladesh dan Myanmar.
- Terkait bebas visa, Bangladesh saat ini belum siap untuk memberikan fasilitas bebas visa kepada pemegang semua jenis paspor kepada Negara-negara sahabat, khususnya Indonesia, karena bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu masuk lainnya di Bangladesh belum terintegrasi dengan baik sehingga sulit untuk mengontrol orang asing masuk wilayah Bangladesh. Namun demikian, untuk pemberian visa kunjungan bagi para relawan IHA, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kedubes Bangladesh di Jakarta untuk memberikan visa kunjungan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk melakukan aktivitas kemanusiaan di Cox's Bazar.

Pertemuan dengan dengan Duta Besar LB dan BP Republik Indonesia untuk Bangladesh (Rina P. Soemarno). Dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI untuk Bangladesh melaporkan berbagai hal terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Bangladesh termasuk masalah pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

Kunjungan ke tempat pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh. Pada saat tiba di Bandara Cox's Bazar pada tanggal 20 Desember 2017, delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bertemu dengan Menlu Bangladesh Mr. Abdul Hassan Mahmood Ali yang baru saja mendampingi PM Turki ke Cox's Bazar. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Menlu Mahmood Ali meminta Mr. Shaimum Sarwar Kamal (Anggota Parlemen Cox's Bazar) untuk mendampingi delegasi Wakil ketua DPR RI/Korpolkam selama kunjungan lapangan di Cox's Bazar tanggal 21 Desember 2017. Pada kunjungan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan rombongan melihat langsung berbagai aktivitas kemanusiaan LSM Internasional di area pengungsi, delegasi juga melakukan pertemuan dengan personil IHA, UNHCR, IOM dan District Commissioner Cox's Bazar, serta pertemuan tertutup dengan beberapa orang Rohingya korban kekerasan militer Myanmar yang difasilitasi oleh UNHCR.



Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam tiba di Bandara Cox's Bazar disambut oleh Menlu Bangladesh, AH Mahmood Ali, didampingi oleh Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P. Soemarno.



Kunjungan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke tempat pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh pada tanggal 20-21 Desember 2017



Kunjungan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke tempat pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh pada tanggal 20-21 Desember 2017



Kunjungan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke tempat pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh pada tanggal 20-21 Desember 2017



Kunjungan Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke tempat pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh pada tanggal 20-21 Desember 2017

III. Masa Persidangan III

1. Sabtu s.d. Selasa, 11 s.d. 16 Januari 2018, Memimpin Delegasi DPR RI ke Sidang PUIC di (13 th Session of the PUIC Conference and Other Related Meetings, Tehran – Islamic Republic of Iran).



2. Kamis s.d. Rabu, 18 s.d. 24 Januari 2018, Memimpin Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri (Muhibah) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Qatar.

Pertemuan dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, H.E. Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi, Minggu waktu Dhoha (21/1).

- Dalam pertemuan tersebut, H.E. Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia yang telah menjadi negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Qatar melihat keberhasilan demokrasi di Indonesia telah menginspirasi banyak negara.
- H.E. Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi juga melihat keberhasilan Indonesia dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Sebagai negara muslim, Qatar dan Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan toleransi dan ajaran Islam yang rahmatan lilalामीn kepada seluruh dunia. Sebab ini adalah upaya paling efektif untuk mencegah berkembangnya terorisme.
- Dalam kesempatan ini, Menteri Negara Luar Negeri Qatar juga menghargai peran aktif Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingnya. Ia menekankan, kehadiran Indonesia dan Qatar di Rohingnya, lebih dari alasan kemanusiaan.
- Delegasi Indonesia menyampaikan Qatar memiliki peran strategis bagi dunia. Indonesia setuju dengan pandangan bahwa demokrasi dapat tumbuh baik di setiap negara, sejauh disesuaikan dengan nilai, sejarah, dan budaya negara tersebut. Sebab demokrasi bukan *one size fits all system*. Itu sebabnya setiap

negara harus saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak melakukan intervensi terhadap urusan politik dan kebijakannya.

- Delegasi Indonesia sangat setuju dan menyambut baik ajakan Qatar untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang tersebut. Terorisme yang selama ini banyak dikaitkan dengan Islam adalah pandangan menyesatkan. Bahkan untuk situasi di Indonesia, tidak pernah ada bentuk kekerasan teroris seperti bom bunuh diri, sebelum peristiwa 9/11. Jadi, bagi Indonesia sendiri, terorisme adalah fenomena ancaman keamanan yang baru.
- Delegasi Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas blokade Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir yang diberlakukan terhadap Qatar. Keputusan blokade secara mendadak tersebut sangat disayangkan. Sebab Indonesia tak



melihat alasan yang cukup kuat untuk menerapkan blokade terhadap Qatar. Dalam hal ini, sesuai konstitusi Indonesia, Indonesia melihat blokade terhadap Qatar hanya akan memunculkan potensi konflik yang lebih besar yang justru akan merugikan semua pihak terkait.

Pertemuan dengan Ketua Parlemen Qatar HE Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud

- Ketua Parlemen Qatar HE Ahmed bin Abdullah menyambut positif kedatangan parlemen Indonesia. Qatar juga mengapresiasi sikap objektif Indonesia dalam melihat konflik di kawasan Teluk Arab.
- Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan Indonesia. Parlemen Qatar menyampaikan tak pernah terprovokasi oleh kebijakan blokade yang dilakukan negara tetangga mereka.
- Delegasi parlemen Indonesia, menyampaikan bahwa kebijakan blokade dari sejumlah negara tetangga terhadap Qatar adalah satu keputusan yang sangat disesalkan. Delegasi sependapat dengan hasil investigasi dari United Nations-Office of the High Commissioner for Human Rights (UN-OHCHR), yang menyatakan blokade terhadap Qatar adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga blokade ini harus segera dihentikan
- Parlemen Indonesia mengusulkan pembentukan kerja sama bilateral (*friendship group*). Saat ini DPR telah punya *friendship group* bersama lebih dari 50 negara.
- Terkait dengan pembentukan grup kerja sama antarparlemen, Ketua Parlemen Qatar ingin agar wadah tersebut dapat segera terbentuk. HE Ahmed bin Abdullah bin Zaid al-Mahmoud yakin bahwa pembentukan grup kerja sama antarparlemen akan membawa dampak yang lebih positif bagi hubungan kedua parlemen.

IV. Masa Persidangan IV

1. Kamis s.d. Rabu, 22 s.d. 28 Maret 2018, memimpin Delegasi DPR RI untuk menghadiri 138th Assembly of the IPU and related meetings di Jenewa, Swiss.





V. Masa Persidangan V

LAIN-LAIN :

I. MASA PERSIDANGAN I

1. Jumat, 18 Agustus 2017, Membuka Pesta Rakyat Panjat Bambu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 72 di halaman Gedung DPR RI.
2. Senin, 11 September 2017, Memimpin Rapat Delegasi Sidang Umum ke 38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 – 20 September 2017 di Manila Filipina.
3. Kamis, 14 September 2017, membuka Parlemen Remaja 2017 di Gedung DPR RI Ruang Abdul Muis.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Selaku Pimpinan DPR RI, mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, para wakil siswa dan siswi terbaik Indonesia, atas kehadirannya di gedung wakil rakyat ini. Anda adalah orang-orang pilihan yang telah berhasil melalui seleksi untuk mengikuti kegiatan ini.
- Selalu merasa senang berada di tengah anak-anak muda seperti dalam forum hari ini. Sebab, bagi saya pribadi, berada di tengah anak-anak muda selalu menerbitkan rasa takjub dan optimisme. Menerbitkan rasa takjub, karena sebagaimana dibentangkan oleh sejarah, persis pada usia adik-adik peserta Parlemen Remaja inilah, banyak orang-orang besar mulai membuat kejutan dan mencatatkan perannya dalam sejarah.
- Sesuai konsep Trias Politika, DPR RI berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyusun undang-undang sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut. **Fungsi pengawasan** bisa dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, **fungsi legislasi** dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

- Mengikuti prinsip Trias Politika tersebut, DPR RI harus menghindari menjalankan fungsi sebagai penasihat pemerintah, apalagi sekadar memberi stempel atas berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.
- Jika kita masih ingat, cikal bakal parlemen pada masa kolonial Belanda dulu, Volksraad, juga memainkan posisi parlemen yang pincang seperti itu. Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada “menyuarakan” kehendak rakyat Hindia Belanda ketika itu. Itu sebabnya, pada masanya Volksraad dianggap oleh para tokoh pergerakan sebagai “parlemen gadungan”, karena tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya yang bisa mengontrol pemerintahan eksekutif.
- Itu sebabnya, agar DPR benar-benar berfungsi sesuai tuntutan konstitusi, DPR harus bisa mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Sebab, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, DPR tidak hanya memiliki peran untuk memproduksi undang-undang, namun juga memastikan ditegakkannya undang-undang tersebut. Di sini, fungsi pengawasan dan kontrol DPR hanya akan bisa efektif jika ia selalu mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat menginginkan agar DPR bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyuarakan kesulitan-kesulitan hidup rakyat kepada pemerintah.
- Parlemen Remaja tahun 2017 ini merupakan penyelenggaraan Parlemen Remaja yang ke-12. Saya dilapori jika 136 peserta Parlemen Remaja yang hadir hari ini merupakan hasil seleksi dari 6.686 pendaftar dari seluruh Indonesia. Besarnya peminat kegiatan Parlemen Remaja menunjukkan jika ada banyak anak muda Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana praktik dan proses demokrasi yang selama ini berjalan di DPR.
- Jika sebelum ini Saudara hanya bisa melihat dari layar televisi atau melalui media massa, maka hari ini Saudara bisa menyaksikannya dari dekat bagaimana praktik dan proses berdemokrasi yang berlangsung di gedung wakil rakyat ini. Bahkan, bukan hanya melihat, karena Anda juga akan terlibat dalam simulasi sidang parlemen sebagaimana yang biasa diikuti oleh anggota parlemen kita.



- Melalui simulasi ini Anda akan memahami bahwa seorang legislator dituntut bukan hanya mampu meyakinkan pendapatnya kepada pihak lain dalam berdiskusi, tetapi juga mampu menjadi pendengar yang baik atau menghargai pendapat orang lain. Itu sebabnya, pengalaman berorganisasi memberi bekal yang penting sekali bagi anggota parlemen. Dan Anda merupakan orang-orang yang beruntung karena bisa memperoleh pengalaman menjadi peserta Parlemen Remaja 2017.
- Forum seperti Parlemen Remaja ini merupakan forum penting untuk menghubungkan DPR RI kepada publik yang luas, sekaligus juga penting karena akan menghubungkan anak-anak muda kreatif dan intelek dari berbagai pelosok Indonesia sehingga bisa saling bertukar pikiran satu sama lain.
- Berada di tengah-tengah Anda, pemuda-pemudi dari Sabang sampai Merauke, saya merasa yakin dan optimis bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin berkembang. Akhirnya, dengan bangga saya buka secara resmi Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2017 dan saya ucapkan “SELAMAT BERSIDANG”.

4. Jumat, 22 September 2017, Membuka Peluncuran DVD Senam Hijaiyah



5. Senin, 25 September 2017, Menghadiri undangan Live Prime CNN Indonesia.



6. Selasa, 26 September 2017, Membuka pameran Filateli, “Prangko dalam Kebinekaan” di Gedung DPR RI.





7. Rabu, 28 September 2017, Menerima Siswa SMU se Kabupaten Bogor



8. Senin, 2 Oktober 2017, menghadiri Undangan Invitation Ambassador of Switzerland, Yvonne Bauman.
9. Selasa, 10 Oktober 2017, Menghadiri undangan Taipei Economic and Trade Office.

10. Rabu, 4 Oktober 2017, Membaca Puisi pada Hari Puisi Indonesia.



11. Rabu, 11 Oktober 2017, Menghadiri undangan TV One, menjadi Narasumber Dua Sisi.



12. **Kamiis, 19 Oktober 2017, Menerima audiensi dengan SMAIT Insantama.**



13. **Kamis, 19 Oktober 2017, Menghadiri Program “Rosi Spesial” di Kompas TV”.**



14. **Rabu, 25 Oktober 2017, Membuka Pameran Kujang dan Keris Pasundan di Gedung DPR RI.**

Pembukaan Pameran Kujang dan Keris Pasundan



15. **Rabu, 25 Oktober 2017, Menghadiri Sarasehan Kujang Budaya dengan tema Nilai-nilai Falsafah Kujang dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa di Gedung DPR RI.**



Peninjauan Stand Pameran Kujang dan Keris Pasundan



Pembukaan Sarasehan Kujang Budaya dengan tema Nilai-nilai Palsafah Kujang dan memperkokoh jati diri Bangsa.

- 16. Rabu, 25 Oktober 2017, Memimpin FGD Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan DIY. Dengan tema "Freeport dan Papua".**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berfoto dengan Pembicara dan peserta FGD.



*FGD Tentang Papua
Peserta FGD Papua sedang diskusi.*

II. MASA PERSIDANGAN II

1. Senin, 4 Desember 2017, Menerima Sdr. Muhammad Luthfan Hadi Darus tentang Wawancara Disertasi.
2. Senin, 4 Desember 2017, Menerima Sdri. Maemudah Lubis tentang wawancara Disertasi.
3. Senin, 5 Desember 2017, Menghadiri Undangan On the Oscasion of the Nasional Day of the Kingdom of Thailan.
4. Selasa, 5 Desember 2017, Menghadiri Undangan Makan Malam “to say good-bye to our friends” Kedutaan Rusia.
5. Rabu, 6 Desember 2017, Menerima siswa SMA Indocement Bogor di Gedung Abdul Muis.
6. Jumat, 8 Desember 2017, Menghadiri Undangan Pelantikan Panglima TNI oleh Presiden RI di Istana Negara.
7. Jumat, 8 Desember 2017, Menghadiri Ferewell Reception Dubes Korea Selatan H.E.Mr. Taiyoung Cho dan Mme Gyeyoung Cho.
8. Selasa 12 Desember 2017, Memberikan Pidato Kunci pada ekspos dan pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan Tema “Membangun Papua uantuk Indonesia”.

III. MASA PERSIDANGAN III

1. Rabu, 10 Januari 2018, menerima Kunjungan Siswa SMA Wijaya Plus, Ciawi Bogor, Jawa Barat.



2. Rabu, 31 Januari 2018, manerima Kunjungan Siswa SMA 1 Rumpin dan SMA Islam Terpadu Insantama Bogor.



3. Rabu, 31 Januari 2018, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Intern Tim Penguatan Diplomasi Parlemen. Dalam rapat tersebut dibicarakan antara lain:
- Agar Sekretariat Jendral DPR RI membuat aturan, agar tidak ada negara yang terlalu banyak dikunjungi sedangkan di sisi lain ada negara yang tidak pernah dikunjungi disertai dengan klasifikasi negara-negara seperti yang telah dibuat oleh Kementerian Luar Negeri.
 - Agar Delegasi Teknis BKSAP kembali kepada tujuan awal dibentuknya Delegasi Teknis BKSAP yaitu mengunjungi negara-negara yang mempunyai masalah dengan Negara Republik Indonesia, sehingga Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengarahkan Delegasi Teknis BKSAP untuk berkunjungnya ke Negara Pasifik seperti Vanuatu, Solomon Island dan Fiji dalam rangka membantu Diplomasi RI untuk masalah Papua.
 - Alat kelengkapan Dewan diminta membuat rekap negara-negara mana saja yang akan dikunjungi.
 - Terkait surat dari KBRI Moskow, Rusia yang memberikan catatan-catatan Delegasi Parlemen RI untuk di *Sounding* kepada Anggota Dewan.
 - Meminta kepada BKSAP DPR RI untuk segera membentuk GKSB Qatar dan GKSB Georgia dan mengundang Parlemen Qatar ke Indonesia.

4. Selasa, 6 Februari 2018, menghadiri Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke 10 dan Pembukaan Turnamen Bola di lapangan Setjen DPR RI



5. Kamis, 8 Februari 2018, Peluncuran Buku Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, di Press Room/Media.



6. Senin, 12 Februari 2018, menghadiri undangan dalam rangka meresmikan Klinik E-LHKPN dan Pusat Pelayanan Terpadu yang terdiri dari Pengaduan Masyarakat, Penyaluran Delegasi Masyarakat dan Informasi Publik.



IV. MASA PERSIDANGAN IV

- 1) **Senin, 5 Maret 2018** menjadi Nara Sumber di acara **Apa Kabar Indonesia Malam TVOne** mengenai **Muslim Cyber Army**.



- 2) **Selasa, 6 Maret 2018**. Menjadi nara sumber acara **:siapa dibalik MCA”**.



- 3) **Rabu, 7 Maret 2018, Menjadi Nara Sumber Talkshow Dua Sisi TVOne dengan Tema “Seputar Presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilpres”.**



- 4) **Kamis, 8 Maret 2018, menghadiri acara penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017, Pimpinan dan Anggota DPR RI.**



- 5) Kamis, 8 Maret 2018, memimpin rapat persiapan teknis dan substansi Delegasi yang akan menghadiri *The 138th Assembly of Inter Parliamentary Union (IPU) and related meetings* tanggal 24 s.d. 29 Maret 2018 di Jenewa Swiss.



- 6) Selasa, 13 Maret 2013, Memimpin Rapat Pleno PPPFI (Filateli)



7) Selasa, 13 Maret 2018, Memimpin Rapat Pleno DPP IKM



8) Rabu, 14 Maret 2018, menghadiri Peringatan Internanational Women's Day 2018, di Hall Gedung Nusantara DPR RI.



- 9) Senin, 2 April 2018, menghadiri undangan Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2018-2020.



- 10) Tanggal 5, 6, 7, dan 8 Mei 2018. Piket Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam (Bapak Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. dalam Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

V. MASA PERSIDANGAN V

Jakarta, Juni 2018
KABAG SET. WATUA DPR- RI/KORPOLKAM

ISNU PURWANTO, S.I.P., M.M.
NIP.19620313 198203 1 001

